

**ANALISIS PENERAPAN ASURANSI KERUGIAN DALAM  
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**TIA DESTIANA  
NPM. 1451020130**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439H/2018M**

**ANALISIS PENERAPAN ASURANSI KERUGIAN DALAM  
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Tia Destiana  
NPM.1451020130**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**Pembimbing I : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I**

**Pembimbing II : Fatih Fuadi, M.S.I.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1439H/2018M**

## ABSTRAK

Seiring dengan peningkatan aktivitas pembiayaan oleh bank syariah, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan peningkatan kebutuhan akan mobilitas masyarakat yang meningkat. Hampir setiap rumah tangga memiliki paling tidak satu atau lebih kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Untuk mengurangi risiko yang terjadi, maka diperlukan suatu pengalihan risiko kepada pihak lain melalui asuransi. Secara umum asuransi adalah menyerahkan pertanggungjawaban risiko kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi untuk jangka waktu dan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Dalam penelitian ini, pembiayaan kendaraan bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha mengasuransikan jenis pembiayaannya dalam asuransi kerugian.

Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha? 2) Bagaimana penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan menurut perspektif Ekonomi Islam? Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 2) Untuk mengetahui penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor menurut perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis penelitian dalam penulisan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan kendaraan bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan asuransi kerugian sebagai pengalihan risikonya dimana jenis pertanggungjawaban asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan *Total Loss Only* (TLO) yang menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan karena kehilangan atas pencurian. Premi asuransi hanya dibayar pada satu kali pembayaran yakni pada saat masa pembiayaan belum berjalan. Untuk mempermudah perhitungan nilai premi dihitung menggunakan kalkulator asuransi yang telah disediakan oleh pihak asuransi dengan melihat harga jual kendaraan bermotor saat ini, suku premi, biaya administrasi dan lain-lain. Kemudian untuk klaim asuransi kendaraan bermotor, lembaga asuransi mengganti sisa pokok dari jumlah pembiayaannya sampai pada bulan ditutupnya. Diketahui bahwa secara prinsip-prinsip asuransi kerugian yang diterapkan PT. BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip berserah diri dan ikhtiar, prinsip tolong menolong, prinsip saling bertanggung jawab, prinsip saling kerja sama dan bantu membantu, prinsip saling menanggung risiko.

**Kata Kunci: Penerapan, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Asuransi Kerugian, Premi Asuransi, Klaim Asuransi.**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame 1, Bandar Lampung 35131

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENERAPAN ASURANSI KERUGIAN  
DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)**

Nama

: **Tia Destiana**

NPM

: **1451020130**

Jurusan

: **Perbankan Syariah**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunagasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munagosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

  
**Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I**  
**NIP. 197707252002121001**

Pembimbing II

  
**Fatih Fuadi, M.S.I**  
**NIP. 198512192015031006**

Ketua Jurusan

  
**Ahmad Habibi, S.E., M.E.**  
**NIP. 197905142003121001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama 1, Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN ASURANSI KERUGIAN DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)**, disusun oleh Nama : **Tia Destiana NPM. 1451020130**, Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munasqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Senin/30 Juli 2018**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang**

**Drs. H. Nasruddin, M.Ag.**

**Sekretaris**

**Yulistia Devi, M.S.Ak.Akt**

**Penguji I**

**Dr. Asriani, S.H., M.H**

**Penguji II**

**Budimansyah, M.Kom.I**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Dr. Moh. Bahrudin, M.A.**  
**NIP. 195808241989031003**





### PERNYATAAN ORISINILITAS

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Destiana

NPM : 1451020130

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN ASURANSI KERUGIAN DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab penulis dan penulis menerima segala sanksi sebagai akibatnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 19 Maret 2018  
Yang menyatakan,

**Tia Destiana**  
**NPM. 1451020130**

## MOTTO

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"(Q.S. Al-Baqarah : 185)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS Al-Baqarah: 185)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga kepada-Mu ya Allah, yang mana skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Dahrizal dan Ibunda Ida Suryani, terima kasih untuk setiap lantunan doa-doanya, dukungannya, serta kasih sayang yang tiada pernah putus disetiap langkah, yang selalu memberikan makna dalam setiap kehidupan, semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Adikku Dian Pratiwi, saudara, sepupu, keponakan dan orang-orang terdekat yang selalu menyayangi dan mendukung dalam hal apapun.
3. Sahabat-sahabat terbaikku teruntuk Ratu Desta, Rima Puspita Dewi, Martin Fajar Suma, Anisa Roziana, Siti Wulandari, Firstella Apnizar, Nurelita, yang selalu bersama-sama berjuang, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya kelas C, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan secara langsung maupun tidak langsung.
5. Almamaterku tecinta tempatku menimba ilmu-ilmu yang Rabbani, UIN Raden Intan Lampung. Semoga semakin jaya, maju dan berkualitas.



## RIWAYAT HIDUP

Tia Destiana, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Desember 1996, anak pertama dari pasangan Dahrizal dan Ida Suryani.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Sandhy Putra Telkom Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2002. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawah Lama Bandar Lampung selesai tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Bandar Lampung selesai tahun 2011. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bandar Lampung selesai tahun 2014.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah di UIN Raden Intan Lampung melalui jalur undangan pada tahun 2014.



Bandar Lampung, 19 Maret 2018  
Penulis

**Tia Destiana**  
**NPM. 1451020130**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufiq dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai pada akhir zaman.

Penulis skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Raden Intan Lampung.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih melalui tulisan ini kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Moh. Bahrudin, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa mengayomi mahasiswanya.



3. Ahmad Habibi, S.E.,M.E. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu mendukung mahasiswanya dalam mengerjakan skripsi.
4. Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I. selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing I yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Fatih Fuadi, M.S.I. selaku pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membagi ilmu, membantu serta memberikan masukan-masukan yang insya Allah dapat menjadi pedoman dan bekal untuk penulis.
7. Mat Amin. SE.Akt. selaku pimpinan PT. BPRS Mitra Agro Usaha dan Agritia Gita Pratiwi selaku Manajer Operasional beserta staf-stafnya yang telah sedikit banyak telah membantu dalam mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang penulis lakukan.
8. Ayahanda Dahrizal dan Ibunda Ida Suryani, terima kasih untuk setiap lantunan doa-doanya, dukungannya, serta kasih sayang yang tiada pernah putus disetiap langkah, yang selalu memberikan makna dalam

setiap kehidupan, semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada Ayah dan Ibu.

9. Adikku Dian Pratiwi, saudara, sepupu, keponakan dan orang-orang terdekat yang selalu menyayangi dan mendukung dalam hal apapun.
10. Sahabat-sahabat terbaikku teruntuk Ratu Desta, Rima Puspita Dewi, Martin Fajar Suma, Anisa Roziana, Siti Wulandari, Firstella Apnizar, Nurelita, yang selalu bersama-sama berjuang, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya kelas C, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan secara langsung maupun tidak langsung.
12. UPT perpustakaan baik pusat maupun fakultas, terima kasih atas segala pelayanan, peminjaman buku dan penyediaan tempat yang diberikan sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan-kebaikan serta melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amiiin.

Bandar Lampung, 19 Maret 2018  
Penulis

**Tia Destiana**  
**NPM.1451020130**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian.....	13

## BAB II LANDASAN TEORI

<b>A. ASURANSI SYARIAH</b>	
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	20
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	20
3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.....	27
4. Jenis-jenis Asuransi Syariah.....	28
5. Manfaat Asuransi Syariah .....	31
6. Risiko Asuransi Syariah .....	32
7. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah .....	33
<b>B. PEMBIAYAAN</b>	
1. Pengertian Pembiayaan .....	36
2. Unsur Pembiayaan.....	36
3. Fungsi Pembiayaan.....	37
4. Manfaat Pembiayaan .....	39
5. Jenis-jenis Pembiayaan.....	42
6. Skema Proses Pembiayaan .....	45
7. Analisis Pembiayaan .....	48
<b>C. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR</b>	
1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor .....	52
2. Jaminan Yang Diberikan .....	52
3. Risiko Yang Dapat Dijamin .....	52

4. Risiko Yang Tidak Dapat Dijamin .....	53
5. Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor .....	53
<b>D. Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>54</b>
<b>E. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>54</b>

### **BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian</b>	
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	56
2. Dasar Hukum Berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	57
3. Lokasi PT. BPRS Mtra Agro Usaha .....	58
4. Visi, Misi dan Moto PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	58
5. Struktur Pemilik dan Pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	58
6. Prinsip Utama PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	61
7. Usaha yang Dijalankan PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	62
8. Produk-produk PT. BPRS Mtra Agro Usaha .....	63
<b>B. Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha</b>	
1. Pengertian dan Dasar Asuransi Kendaraan Bermotor .....	66
2. Jenis Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	67
3. Syarat-syarat Pengajuan Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	70
4. Risiko-risiko yang Dijamin dan Tidak Dijamin Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	72
5. Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	73
<b>C. Alur Asuransi Kendaraan Bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....</b>	<b>75</b>
<b>D. Tingkat Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....</b>	<b>78</b>

### **BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>79</b>
1. Penerapan Asuransi Kerugian Pada Motor .....	81
2. Penerapan Asuransi Kerugian Pada Mobil .....	84
<b>B. Premi .....</b>	<b>87</b>
<b>C. Klaim .....</b>	<b>89</b>
<b>D. Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....</b>	<b>100</b>



## **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>103</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>104</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1.1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 2011 s.d 2016 .....	4
1.2 Rangkuman Penelitian Terdahulu .....	11
1.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	12
3.1 Data Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2015-2017 .....	78
4.1 Tanggapan Responden Mengenai Adanya Asuransi Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	93
4.2 Tanggapan Responden Mengenai Adanya Informasi yang Diberikan Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	93
4.3 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	94
4.4 Tanggapan Responden Mengenai Berapa Lama Waktu Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	96
4.5 Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kepuasan Nasabah Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	97
4.6 Tanggapan Responden Mengenai Peningkatan Pelayanan Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	98

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Proses Pembiayaan .....	47
3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	60
3.2 Prosedur Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	76





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Kesediaan Memberikan Izin Pra Riset
- Lampiran II : Surat Kesediaan Memberikan Izin Riset
- Lampiran III : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Manajer Operasional
- Lampiran IV : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Financing Support
- Lampiran V : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Nasabah
- Lampiran VI : Formulir Aplikasi Pembiayaan
- Lampiran VII : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara
- Lampiran VIII : Surat Persetujuan Seminar Proposal
- Lampiran IX : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran X : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran XI : Jadwal Sidang Munaqosyah Periode Juli 2018
- Lampiran XII : Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001
- Lampiran XIII : Blanko Konsultasi
- Lampiran XIV : Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam judul ini, maka perlu adanya suatu uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah kata yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan adanya penegasan istilah tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul ini, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha).**

Untuk mengetahui pokok-pokok judul diatas, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

**Analisis** adalah cara befikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan.<sup>1</sup>

**Penerapan** adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.

<sup>2</sup>“Penerapan” (On-Line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/penerapan.htm> (23 November 2017).

**Asuransi Kerugian** adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.<sup>3</sup>

**Pembiayaan** adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

**Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisis penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang ada di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.




---

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 251.

<sup>4</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105.

<sup>5</sup>"Kendaraan Bermotor" (On-Line), tersedia di <http://id.m.wikipedia.org/wiki/> (14 Desember 2017).



## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi tentang Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Objektif

Penulis tertarik untuk membahas dan menulis penelitian ini karena dalam fakta yang ada, jika terjadi kerugian karena pencurian, pihak asuransi menolak membayar klaim dengan alasan bahwa kendaraan bermotor hilang karena penggelapan. Sehingga banyak dari sebagian masyarakat merasa kecewa atas keputusan yang diambil dari pihak lembaga asuransi. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui penerapan asuransi kerugian terhadap pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

### 2. Secara Subjektif

- a. Pokok bahasan ini sesuai dengan jurusan yaitu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan penerapan asuransi kerugian.
- b. Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan, hal ini didukung tersedianya literatur-literatur di perpustakaan atau pun sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan berkaitan dengan asuransi kerugian.

### C. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan peningkatan aktivitas pembiayaan oleh bank syariah, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan peningkatan kebutuhan akan mobilitas masyarakat yang meninggi, serta kualitas kendaraan umum yang rendah juga menambah daya beli masyarakat secara keseluruhan. Hampir setiap rumah tangga memiliki paling tidak satu atau lebih kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.<sup>6</sup> Tabel berikut memperlihatkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis**  
**Tahun 2011 s.d 2016**

Jumlah Kendaraan Bermotor	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mobil Penumpang	9.548.866	10.432.259	11.284.514	12.599.038	13.480.973	14.540.666
Mobil Bus	2.254.406	2.273.821	2.286.309	2.398.846	2.420.917	2.486.898
Mobil Barang	4.958.738	5.286.061	5.615.494	6.235.136	6.611.028	7.063.433
Sepeda Motor	68.839.341	76.381.183	84.732.652	92.976.240	98.881.267	105.150.082
Jumlah	85.601.351	94.373.324	104.118.969	114.209.260	121.394.185	129.81.079

*Sumber Data : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (data diolah kembali)*

<sup>6</sup> Angger Guntur Alit “Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPM) Berdasarkan Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 Dan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Contoh Kasus Pada PT. Bank SYR Indonesia)”. *Jurnal Ekonomi*, 2013, h. 3.

Dapat terlihat dari tabel 1.1 di atas peningkatan terjadi rutin setiap tahunnya untuk semua jenis kendaraan bermotor. Peningkatan atas kendaraan bermotor dijadikan peluang oleh lembaga pembiayaan begitu pula perbankan syariah untuk menawarkan produk konsumtif kendaraan bermotor yang banyak dikenal dengan pembiayaan kendaraan bermotor. Berbagai fasilitas yang memudahkan, mulai dari proses pengajuan sampai dengan pengurusan asuransi disediakan oleh lembaga pembiayaan. Beberapa akad yang bisa digunakan antara lain adalah akad *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Ijarah Muntahia Mittamlik*, dan *Musyarakah Mutanaqisah*. Namun berdasarkan survey kebanyakan bank syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual-beli, di antaranya adalah *murabahah* dan *murabahah investasi*, bahkan produk *murabahah* merupakan produk yang paling banyak digunakan selama ini.<sup>7</sup>

Dalam menjalani kehidupan, kita tidak selalu dihantui oleh perasaan was-was akan terjadinya peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, seperti halnya sebuah kejadian yang mana memungkinkan kita mengalami sebuah risiko yang memang tidak pernah diduga sebelumnya. Risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya. Suatu antisipasi diperlukan untuk mengurangi risiko yang terjadi serta tidak semua orang mampu mengatasi risiko yang terjadi, maka diperlukan suatu pengalihan risiko kepada pihak lain melalui asuransi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 4.

<sup>8</sup>Mega Listra, "Analisis Implementasi Asuransi Jiwa Dan Asuransi Kebakaran Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.



Secara umum asuransi adalah menyerahkan pertanggungan risiko kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi untuk jangka waktu dan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.<sup>9</sup>

Bahwa pada hakikatnya, semua asuransi bertujuan untuk menghadapi risiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama risiko terhadap kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasinya. Dan jika suatu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.<sup>10</sup>

Selama masa pembiayaan, PT. BPRS Mitra Agro Usaha memberikan pelayanan pembiayaan kendaraan bermotor dengan mengasuransikan

---

Kantor Cabang Syariah Malang”. (Skripsi Program Sarjana Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), h. 4.

<sup>9</sup>R.Permata Hastuti A, F.Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah & BPJS* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), h. 12.

<sup>10</sup>*Ibid.* h. 15.

pembiayaannya dalam bentuk yakni asuransi kerugian (kehilangan). Asuransi kerugian yang dipertanggungjawabkan adalah dalam hal pencurian, dalam polis harus diperjanjikan bahwa kerugian akibat pencurian menjamin bila dalam batas waktu 3x24 jam kendaraan tersebut belum ditemukan.<sup>11</sup>

Namun, dalam fakta yang ada, jika terjadi kerugian karena pencurian, tetapi asuransi menolak membayar klaim dengan alasan lain bahwa kendaraan bermotor hilang karena penggelapan. Sehingga banyak dari sebagian masyarakat merasa kecewa atas keputusan yang diambil dari pihak lembaga asuransi.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas tentang perasuransian khususnya pada pembiayaan kendaraan bermotor Bank Syariah maka penulis tertarik dengan mengambil judul penelitian **"Analisis Penerapan Asuransi Kerugian dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha"**.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha?

---

<sup>11</sup>Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)* (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2003), h. 65.

2. Bagaimana penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor menurut perspektif Ekonomi Islam?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

#### **A. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha.
- b. Untuk mengetahui penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor menurut perspektif Ekonomi Islam.

#### **B. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi dan bisnis islam yang berhubungan dengan penerapan asuransi kerugian terhadap pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

##### **b. Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Peneliti**

Untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman untuk berpikir kritis, dan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1).



## 2) Bagi Lembaga Kampus

Sebagai pandangan atau wawasan baru mengenai perbankan syariah dan sebagai bahan masukan bagi fakultas untuk rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

## 3) Bagi Masyarakat

Sebagai referensi bagi masyarakat yang ingin menggunakan produk pembiayaan kendaraan bermotor pada bank syariah.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan hasil penelitian oleh Mega Listra (2015) dengan judul “Analisis Implementasi Asuransi Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang”.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini adalah dalam pembiayaan KPR BTN Syariah menetapkan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Pada asuransi KPR ini, nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban dalam asuransi ini, yaitu membayar kewajiban premi dan mendapatkan hak dari klaim asuransi.
2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Gunawan (2013) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Terhadap Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang Dibebankan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan

---

<sup>12</sup>Mega Listra, “Analisis Implementasi Asuransi Jiwa Dan Asuransi Kebakaran Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang”. (*Skripsi* Program Sarjana Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), h. 11.

Asuransi dan Undang-Undang Jaminan Fidusia”.<sup>13</sup> Menunjukkan bahwa Perusahaan pembiayaan dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal objek jaminan yang hilang/musnah. Didukung dengan Pasal 34 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, debitor tetap bertanggung jawab atas hutangnya kepada kreditor karena hapusnya perjanjian jaminan fidusia tidak menghapus perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan konsumen (utang piutang) dan apabila timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tertanggung antara lain: (a) Mediasi secara musyawarah atau melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia; (b) Arbitrase; (c) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan/atau (d) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi dengan ganti rugi.

3. Berdasarkan hasil penelitian oleh Manopo (2013) dengan judul “Kajian Yuridis Perjanjian Kredit dalam Perusahaan Pembiayaan (*Leasing*) atas Klaim dari Tertanggung Terhadap Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor”.<sup>14</sup> Menunjukkan perlindungan bagi objek leasing (mobil,truk) berupa pemberian ganti rugi terhadap objek *leasing* apabila timbul pengajuan klaim jika terjadi sesuatu terhadap objek *leasing*, dimana hal itu merupakan kondisi pertanggungan

---

<sup>13</sup>Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Terhadap Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang Dibebankan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Asuransi dan Undang-Undang Jaminan Fidusia”. Diperoleh tanggal 16 November 2017.

<sup>14</sup>Menix Manopo, “Kajian Yuridis Perjanjian Kredit dalam Perusahaan Pembiayaan (*Leasing*) atas Klaim dari Tertanggung Terhadap Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor”. *Vol.I/No.06/Okttober-Desember/2013 Edisi Khusus*.

dalam polis asuransi yang wajib ditanggung oleh pihak PT. Autocolin sebagai penanggung yaitu risiko-risiko yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

**Tabel 1.2**  
**Rangkuman Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Mega Listra (2015) “Analisis Implementasi Asuransi Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang”.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi asuransi dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).	Kualitatif/ Deskriptif.	Dalam pembiayaan KPR BTN Syariah menetapkan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Pada asuransi KPR ini, nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban dalam asuransi ini, yaitu membayar kewajiban premi dan mendapatkan hak dari klaim asuransi.
2	Gunawan (2013) “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Terhadap Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang Dibebankan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Asuransi dan Undang-Undang Jaminan Fidusia”.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam peristiwa tersebut, serta upaya hukum tertanggung terhadap penolakan klaim dari pihak asuransi.	Deskriptif	Didukung dengan Pasal 34 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, debitor tetap bertanggung jawab atas hutangnya kepada kreditor karena hapusnya perjanjian jaminan fidusia tidak menghapus perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan konsumen (utang piutang) dan apabila timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tertanggung antara lain: (a) Mediasi secara musyawarah atau melalui Badan Mediasi Asuransi

				Indonesia; (b) Arbitrase; (c) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan/atau (d) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi dengan ganti rugi.
3	Manopo (2013) dengan judul “Kajian Yuridis Perjanjian Kredit dalam Perusahaan Pembiayaan (Leasing) atas Klaim dari Tertanggung Terhadap Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor”.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian klaim jika terjadi sengketa antara perusahaan Asuransi dan Customer yang kendaraan bermotornya dileasingkan di perusahaan pembiayaan.	Pendekatan hukum normatif dan empiris.	Perlindungan bagi objek leasing (mobil,truk) berupa pemberian ganti rugi terhadap objek leasing apabila timbul pengajuan klaim jika terjadi sesuatu terhadap objek leasing, dimana hal itu merupakan kondisi pertanggungan dalam polis asuransi yang wajib ditanggung oleh pihak PT. Autocolin sebagai penanggung yaitu risiko-risiko yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

**Tabel 1.3**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Indikator	Persamaan	Perbedaan
1	Fokus Penelitian	Sistem Pembiayaan	Penerapan Asuransi
2	Metode/ Analisis Data	Kualitatif Deskriptif	--

Dilihat dari tabel diatas, *gap research* dari penelitian ini adalah tentang fokus penelitian yang lebih mengacu pada penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha, untuk



metode analisis data tidak ada perbedaan, karena dalam penelitian ini peneliti mencoba membahas secara lebih dalam tentang gambaran penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu memerlukan jawaban.<sup>15</sup> Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan memperoleh data-data yang ada di lapangan.<sup>17</sup> Penelitian ini harus dilakukan langsung di lapangan untuk menemukan dan melakukan

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bima Aksara, 2006), h. 112.

<sup>16</sup>Suryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), h. 32.

<sup>17</sup>Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.

observasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan dilokasi penelitian dan dapat memberikan makna dalam konteks yang sebenarnya. Objek penelitian yang akan dilakukan penulis adalah PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

Dari paparan diatas, peneliti mencoba menjelaskan bahwa dalam penelitian ini tidak membuat dan menguji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objek-objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asuransi dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan riil atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

---

<sup>18</sup>Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu, perusahaan-perusahaan, tokoh-tokoh, perguruan-perguruan tinggi, pimpinan, lembaga-lembaga penelitian ataupun berupa pejabat pemerintah. Dan untuk memperoleh data primer dari penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>19</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu PT. BPRS Mitra Agro Usaha melalui observasi dan wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis mendapatkan dari dokumen-dokumen, literatur-literatur seperti buku-buku, dokumen, referensi, artikel, internet, jurnal serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut juga informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian.<sup>21</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pihak Manajer Operasional, Pihak Financing Support dan

---

<sup>19</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: Bima Aksara, 2009), h. 87.

<sup>20</sup>Suryono, *Op.Cit.* h. 42.

<sup>21</sup>Lexy. J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 132.

Pihak Sales Officer dari PT. BPRS Mitra Agro Usaha yang menangani pembiayaan kendaraan bermotor dan 20 nasabah yang khususnya masih dalam pembiayaan kendaraan bermotor sesuai dengan pokok pembahasan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>22</sup> Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti meninjau langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung kondisi dan keadaan di lapangan.

### b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan

---

<sup>22</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), h. 11.

<sup>23</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55.

dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi yang diberikan, dan jawaban tersebut dicatat dan direkam.<sup>24</sup> Dalam pelaksanaannya peneliti mewawancarai karyawan yang menangani dan mengetahui dengan jelas terkait judul penelitian ini. Hasil wawancara ini digunakan peneliti dalam menjelaskan bagaimana penerapan sistem asuransi kerugian dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui data yang tersedia, biasanya berbentuk surat, catatan harian, cedera mata, laporan, artefak dan foto. Atau dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Data ini bersifat tak terbatas pada ruang dan waktu.<sup>25</sup> Studi dokumen merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah pribadi, atau bentuk lain dari metode observasi.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penerapan sistem asuransi khususnya pada asuransi kerugian (kehilangan).

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 28.

<sup>25</sup>Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141.

<sup>26</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 82.



## 6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan.<sup>27</sup> Menimbang, menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.

Setelah data terkumpul, kemudian langkah-langkah selanjutnya peneliti akan mengolah data mentah yang diperoleh dari tempat atau lokasi penelitian menjadi data yang sistematis sehingga dapat memberi arti dan dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.

Langkah-langkah dalam pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

<sup>27</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 120.

<sup>28</sup>Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.

- b. *Coding*, adalah mengklasifikasikan data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data-data tersebut sesuai atau tidak.
- c. *Sistemazing*, adalah mengeluarkan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menetapkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Mashuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Adutama, 2008), h. 3.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Asuransi Syariah

##### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) berdasarkan Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>1</sup> Dalam hal ini peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi / premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Dalam perusahaan asuransi syariah, dana tetap merupakan milik dari peserta asuransi, perusahaan asuransi hanya sebagai wali amanah atas dana yang dititipkan tersebut.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dijelaskan bahwa ada dua pendapat utama di antara para ulama Islam tentang asuransi, yaitu pandangan yang membolehkan dan pandangan yang mengharamkan:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Fatwa DSN No:21/DSN-MUI/X/2001

<sup>2</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 7.

<sup>3</sup>Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group: 2010), h. 159-161.

a. Pandangan yang mengharamkan. Para ulama dan pemikir Islam yang menganut pandangan yang mengharamkan asuransi di antaranya adalah Muhammad Amin Bin Umar, atau biasa dikenal dengan nama Syekh Ibnu Abidin, salah seorang fuqaha Islam dari mazhab Hanafi. Dalam bukunya yang terkenal, Hasyibah Ibnu Abidin, ia menyatakan bahwa “tidak diizinkan bagi para pedagang untuk mengambil uang pengganti dari barang-barang dagangannya yang telah musnah karena praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun wajib. Sementara ulama lain yang memiliki pandangan yang lebih keras akan keharaman asuransi adalah Syekh Muhammad Al Gazali. Dikatakan oleh beliau bahwa konsep asuransi dikatakan haram karena beberapa alasan, diantaranya adalah:

- 1) Di akhir masa asuransi, dana premi akan dikembalikan beserta dengan bunganya. Praktik ini merupakan riba dan diharamkan. Padahal yang namanya riba telah diharamkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah: 278)<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS Al-Baqarah: 278)

2) Adanya penggantian akan kerugian kepada pihak yang terjamin tidak dapat diterima sesuai dengan syariat Islam, karena perjanjian asuransi bukanlah kerja sama dimana terdapat keuntungan dan kerugian.

3) Para ulama juga menyimpulkan bahwa para peserta asuransi atau para pemegang polis, bila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Inilah yang dikatakan sebagai pemerasan. Dan Al-Qur'an mengharamkan pemerasan atau pengambilan uang dengan cara yang tidak benar, sebagaimana Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa': 29)<sup>5</sup>

4) Hanya sebagian kecil dari yang mengikuti asuransi yang akan merasakan manfaat dari asuransi tersebut. Praktik ini sangat mirip dengan perjudian. Karena menurut sebagian ulama bahwa pada praktiknya asuransi itu tidak lain merupakan judi, maka mereka pun mengharamkannya. Padahal Allah SWT

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS An-Nisa': 29)



dalam Al-Qur'an telah mengharamkan perjudian, sebagaimana

Surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. Al-Baqarah: 219)<sup>6</sup>*

- b. Pandangan yang membolehkan. Para ulama dan pemikir Islam yang menganut pandangan yang membolehkan asuransi syariah: antara lain dikemukakan oleh Ibnu Abidin, Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Universitas Syiria), Syaikh Abdurrahman Isa (guru besar Universitas Al-Azhar Mesir), Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (guru besar Universitas Kairo), Syaikh Abdul Khalaf, dan Prof. Dr. Muhammad al-Bahi. Pada dasarnya, mereka mengakui bahwa asuransi merupakan suatu bentuk muamalat yang baru dalam Islam dan memiliki manfaat serta nilai positif bagi umat selama di landasi oleh praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi menurut Faturrahman Djamil adalah sebagai berikut:

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS Al-Baqarah: 219)

- 1) Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- 2) Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
- 3) Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan dalam kegiatan pembangunan.
- 4) Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.
- 5) Asuransi termasuk usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong

Dalam pandangan yang membolehkan tentang asuransi Islam, diantaranya adalah:

1) Al-Qur'an

a) Surat At-Taghabun Ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. At-Taghabun: 11)<sup>7</sup>*

b) Surat Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS At-Taghabun: 11)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261)<sup>8</sup>

## 2) Sunnah Nabi SAW

Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ

كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ، (رواه مسلم)

Artinya: Dirwayakan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah Swt. Akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”. (HR. Muslim)

3) Dalam hukum positif yang menjadi dasar hukum dalam asuransi syariah adalah:<sup>9</sup>

a) Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah menggunakan pedoman fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS Al-Baqarah: 261)

<sup>9</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit.* h. 12-13.

b) Peraturan Perundang-undangan:

(1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

(2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

(3) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000, tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

(4) Peraturan No. 18/Pmk.010/2010, tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

(5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada pasal 1 ayat ketiga dijelaskan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

### 3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Prinsip ikhtiar dan berserah diri; Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (*ikhtiar*) sesuai dengan kesanggupannya, tetapi pada saat yang bersamaan manusia juga harus berserah diri (*tawakal*) hanya kepada Allah Swt. Seringkali konsep yang salah adalah seseorang langsung berserah diri, tanpa pernah upaya untuk mengusahakan sesuatu. *Tawakal* hanya boleh dilakukan setelah kita melakukan *ikhtiar*.
- b. Prinsip tolong menolong (*ta'awun*); Bahwa setiap peserta asuransi ketika melangsungkan akad, harus memiliki niat untuk tolong menolong di antara atau dengan sesama peserta yang lain. Saling tolong atau tepatnya saling tanggung dalam konteks ini sangat dianjurkan dalam Islam.
- c. Prinsip bertanggung jawab; Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, dan harus melaksanakan kewajiban di balik menerima yang menjadi hak-haknya.
- d. Prinsip saling membantu dan bekerja sama; Salah satu keutamaan umat Islam untuk membantu sesamanya dalam berbuat kebajikan, antara lain tersimbolkan dalam konsep kehidupan berjamaah dan berukhuwah dalam konteksnya sangat luas.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* h. 18-19.



- e. Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan; Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, bencana, dan sebagainya terutama melalui penghimpunan dana *tabarru'* melalui perusahaan yang diberi kepercayaan untuk itu. Asas saling melindungi ini dijunjung tinggi dalam agama Islam.

#### 4. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Jenis-jenis asuransi syariah yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

##### a. Asuransi Ditinjau dari Fungsinya

- 1) Asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 2) Asuransi jiwa, adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.
- 3) Reasuransi, adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi dari asuransi.

##### b. Asuransi Ditinjau dari Polis Dasar

- 1) Asuransi berjangka, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya.

---

<sup>11</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 251.

- 2) Asuransi seumur hidup, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk seumur hidup pemegang polis yang mengharuskannya membayar premi setiap tahun.
- 3) Asuransi dua manfaat, yaitu kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau lebih atau mencapai usia tertentu misalnya 65 tahun sebelum peserta meninggal dunia.
- 4) Asuransi unit investasi, yaitu satu bentuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi.

c. Asuransi Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

- 1) Asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta dan tetap dalam naungan pemerintah.
- 2) Asuransi milik pemerintah, yaitu perusahaan asuransi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh badan yang berwenang dalam pemerintahan.
- 3) Asuransi milik perusahaan asing, yaitu perusahaan asuransi yang kepemilikannya adalah dari negara lain (asing) yang beroperasi dalam negeri Indonesia.
- 4) Asuransi milik campuran, yaitu perusahaan asuransi yang saham dan kepemilikannya milik dari beberapa pihak, baik swasta maupun pemerintah.

d. Asuransi Ditinjau dari Sifat Pelaksanaannya

- 1) Asuransi sukarela, yaitu asuransi yang dilakukan dengan sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan.
- 2) Asuransi wajib, yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

e. Asuransi Ditinjau dari Kegiatan Penunjang Usaha Asuransi

- 1) Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- 2) Pialang reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- 3) Penilai kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang diasuransikan.
- 4) Konsultan aktuarial, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.

5) Agen asuransi, yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

#### 5. Manfaat Asuransi Syariah

Terdapat beberapa manfaat asuransi syariah pada masyarakat, antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkan maka semakin besar pula premi pertanggungan. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- c. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah.

---

<sup>12</sup>*Ibid.* h. 255-256.

- d. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu diantara mereka.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atau suatu bidang usaha tertentu.

#### 6. Risiko Asuransi Syariah

Dalam praktiknya risiko-risiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Risiko murni, artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan.
- b. Risiko investasi, adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan.
- c. Risiko individu, dibagi dua macam:
  - 1) Risiko pribadi, adalah risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat suatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau mati.
  - 2) Risiko harta, adalah risiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang rusak yang menyebabkan kerugian keuangan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.* h. 256-257.



- d. Risiko tertanggung gugat, adalah risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

## 7. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Didalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:<sup>14</sup>

### a. *Underwriting*

*Underwriting* adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

Dalam melakukan proses penerimaan risiko (*underwriting*) terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian. Kedua, tingkat risiko. Ketiga, hukum bilangan besar dimana makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama.

### b. Polis

---

<sup>14</sup>*Ibid.* h. 272-285.

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

c. Premi (Kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola.

Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan investasi untuk keluarga peserta. Jika premi yang dibayarkan kecil, maka klaim yang akan diterima pun kecil juga, sebaliknya jika premi yang dibayarkan besar, maka klaim yang akan diterima pun juga besar.

Penetapan besarnya tarif premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku. Namun pada dasarnya tarif premi menurut aturan pemerintah harus memenuhi unsur berikut:

Penetapan tarif premi asuransi kerugian, perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, antara lain:

2) Penetapan premi harus dilakukan dengan memperhitungkan:

- a) Premi murni dihitung berdasarkan profit kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.
- b) Biaya perolehan, termasuk komisi agen.
- c) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

3) Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan.

d. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

Umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada 4 langkah proses pengajuan klaim, yaitu pemberitahuan kerugian, penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan klaim.

e. Penutupan Asuransi

Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan karena:

- 1) Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula.
- 2) Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlakunya perjanjian belum berakhir.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup>

### 2. Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi

<sup>15</sup>Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Grafindo Creative Writing, 2015), h. 83.

<sup>16</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 87-88.

pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan yang tolong menolong.

- b. Adanya kepercayaan, yaitu suatu keyakinan *shahibul maal* bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
- c. Adanya kesepatan, yaitu antara *shahibul maal* dengan *mudharib* menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- d. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
- e. Adanya penyerahan barang dan jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- f. Adanya unsur waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu.
- g. Adanya risiko, yaitu jika adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan.

### 3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 197-199.

a. Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan daya guna barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, dan produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang.

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya.

d. Menimbulkan kegairahan usaha.

Setiap pengusaha akan selalu berhungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

e. Stabilitas ekonomi.

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor



- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Melalui bantuan pembiayaan antar negara (*G to G, Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima pembiayaan akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

#### 4. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:<sup>18</sup>

##### a. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan nasabah.

---

<sup>18</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Goup, 2011), h. 110-113.

- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.

b. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah yaitu memberikan manfaat untuk memperluas usaha nasabah.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

c. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah.

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter yaitu pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas.

- 3) Pembiayaan disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pendapatan dari bank syariah dan pajak dari nasabah.

d. Manfaat Bagi Masyarakat Luas

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- 3) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, dan jasa lainnya.

## 5. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi:
  - 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
  - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
  - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

- a. Jenis aktiva produktif pada bank Islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:
  - 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:
    - a) Pembiayaan *Mudharabah*, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan

---

<sup>19</sup>Muhammad, *Op. Cit.* h. 201-203.

kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- b) Pembiayaan *Musyarakah*, adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), meliputi:

- a) Pembiayaan *Murabahah*, adalah perjanjian diantara pemilik bank dan nasabah dimana bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati.
- b) Pembiayaan *Salam*, adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
- c) Pembiayaan *Istishna'*, adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dan pembayaran harga boleh diawal, ditengah atau diakhir.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi:

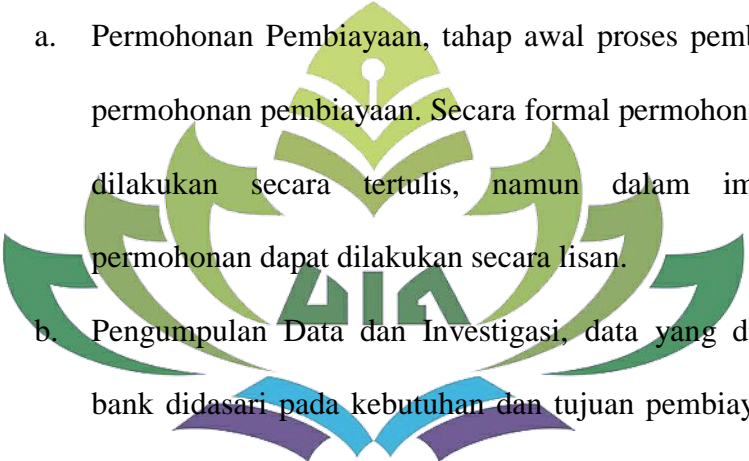
- a) Pembiayaan *Ijarah*, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
- b) Pembiayaan *Ijarah Mutahiya Biltamlik/Wa Iqtina*, adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.
- 4) Surat Berharga Syariah, adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal.
- 5) Penempatan, adalah penanaman dan Bank Syariah pada Bank Syariah lainnya dan/atau Bank Pembiayaan Syariah.
- 6) Penyertaan Modal, adalah penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah.
- 7) Penyertaan Modal Sementara, adalah penanaman modal Bank Syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang.
- 8) Transaksi Rekening Administratif, adalah komitmen dan kontinjensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- 9) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia seperti bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.



- b. Jenis akiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah dalam bentuk pinjaman, yang disebut dengan:
- “Pinjaman Qardh, adalah penyediaan dan dan/atau tagihan antara bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu”.*

#### 6. Skema Proses Pembiayaan

Skema proses pembiayan yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 
- a. Permohonan Pembiayaan, tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun dalam implementasinya permohonan dapat dilakukan secara lisan.
  - b. Pengumpulan Data dan Investigasi, data yang diperlukan oleh bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan yaitu data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya.
  - c. Analisis Pembiayaan, dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank.
  - d. Persetujuan Pembiayaan, adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan.

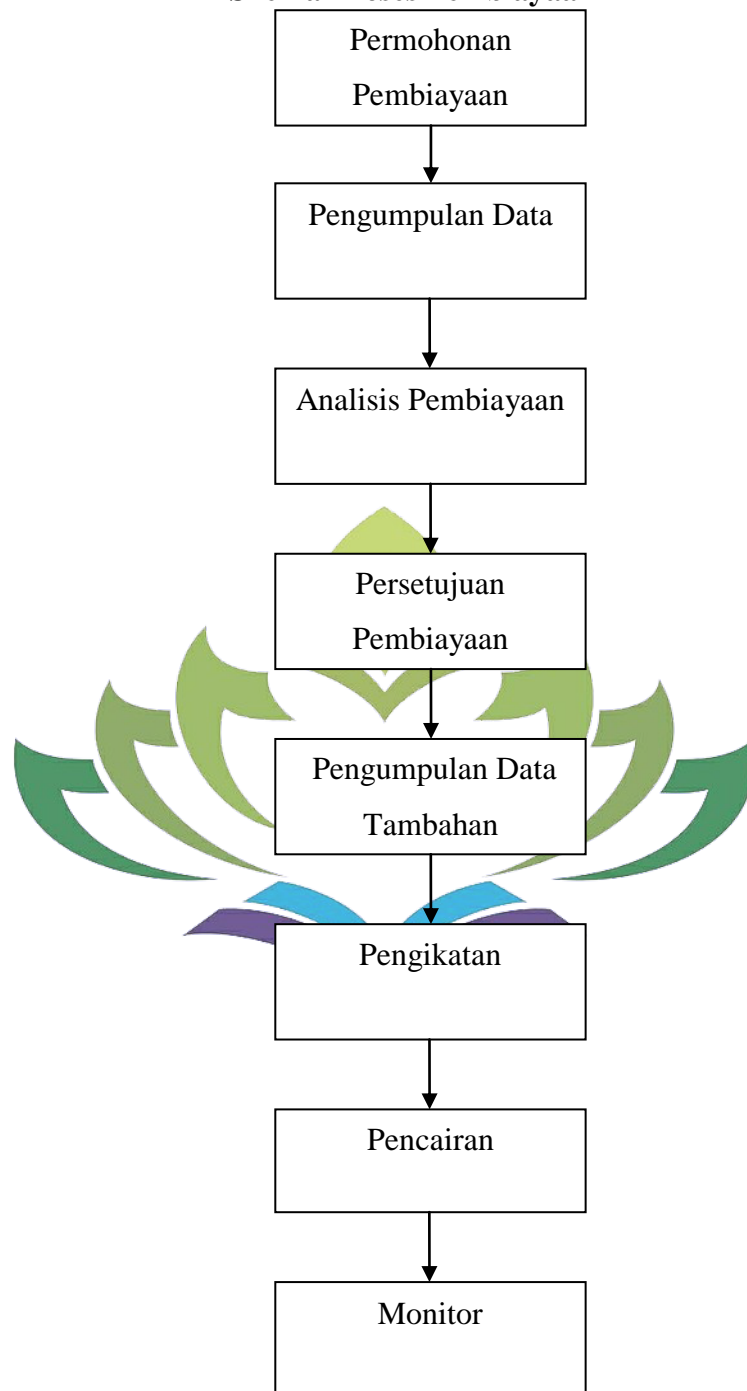
---

<sup>20</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 138-154.

- e. Pengumpulan Data Tambahan, dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan.
- f. Pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan.
- g. Pencairan, apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dapat diberikan.
- h. Monitoring, dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya.



**Gambar 2.1**  
**Skema Proses Pembiayaan<sup>21</sup>**



---

<sup>21</sup>*Ibid.*

## 7. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

### a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

- 1) BI Cheking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia.
- 2) Informasi dari Pihak Lain, yaitu mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya.

### b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan

---

<sup>22</sup>Muhammad, *Op. Cit.* h. 120-125.

bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- 1) Melihat Laporan Keuangan, yaitu dengan melihat laporan arus kas dimana dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.
- 2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan, yaitu bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.
- 3) Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah, yaitu untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

*c. Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah akan meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam

mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital antara lain:

- 1) Laporan Keuangan Calon Nasabah, yaitu bila calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.
- 2) Uang Muka, yaitu bila calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang. Semakin besar uang muka yang dibayarkan untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

#### d. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.



Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

- 1) *Marketability*, yaitu agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- 2) *Ascertainability of value*, yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- 3) *Stability of value*, yaitu agunan yang diserahkan bank memiliki harga stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.
- 4) *Transferability*, yaitu agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.

*e. Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah, yaitu digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- 2) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisi *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi.

### C. Asuransi Kendaraan Bermotor

#### A. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Dijelaskan bahwa asuransi kendaraan bermotor adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian, kerusakan, dan kehilangan atas kendaraan bermotor akibat terjadinya risiko yang menimpa obyek pertanggungan.<sup>23</sup>

#### B. Jaminan Yang Diberikan

Jaminan yang diberikan antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kerugian, kerusakan atau kehilangan atas kendaraan bermotor dari terjadinya risiko yang dijamin dalam polis.
- b. Tanggung jawab hukum atas tuntutan dari pihak ketiga.
- c. Santunan atas kecelakaan pada pengemudi dan penumpang.

#### C. Risiko Yang Dapat Dijamin

Risiko yang dapat dijamin antara lain sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Tabrakan, benturan, terbalik juga termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri.
- b. Perbuatan jahat orang lain, pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman.
- c. Kebakaran atau sambaran petir.

---

<sup>23</sup>R. Permata Hastuti A, F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah & BPJS* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), h. 71.

<sup>24</sup>*Ibid.* h. 71.

<sup>25</sup>*Ibid.* h. 72.

- d. Kerusakan selama kendaraan dalam penyebrangan menggunakan feri yang dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat, kerusakan roda yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan.

#### D. Risiko Yang Tidak Dapat Dijamin

Risiko yang tidak dapat dijamin antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Kehilangan keuntungan selama kendaraan tidak dapat digunakan akibat kecelakaan.
- b. Kerugian akibat penggelapan.
- c. Akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung atau keluarga tertanggung.
- d. Kendaraan digunakan untuk belajar mengemudi atau pelombaan atau karnaval, atau tindak kejahatan, kelebihan muatan, tidak memiliki SIM atau melanggar peraturan lalu lintas, akibat bencana alam atau perang, dll.

#### E. Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor

Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Pembatalan polis
- b. Peralihan hak milik
- c. Terjadi kerugian total
- d. Berakhirnya jangka waktu asuransi

---

<sup>26</sup>*Ibid.* h. 73.

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 192.

#### D. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transpostasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.<sup>28</sup>

#### E. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Berbicara penerapan asuransi kerugian, maka asuransi kerugian yang baik tidak terlepas dari bagaimana perusahaan menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Ekonomi Islam, prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Prinsip ikhtiar dan berserah diri; Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (*ikhtiar*) sesuai dengan kesanggupannya, tetapi pada saat yang bersamaan manusia juga harus berserah diri (*tawakal*) hanya kepada Allah Swt.

<sup>28</sup>“Kendaraan Bermotor” (On-Line), tersedia di <http://id.m.wikipedia.org/wiki/> (14 Desember 2017).

<sup>29</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 87-88.

2. Prinsip tolong menolong; Salah satu poin penting dalam asuransi dimana sebagai sesama nasabah, memiliki kewajiban untuk saling tolong menolong. Prinsip tolong menolong disebut juga sebagai *ta'awun*. Ketika seseorang memutuskan untuk bergabung dalam asuransi maka ia wajib memiliki motivasi serta niat untuk membantu anggota lain, terutama jika anggota terkena musibah.
3. Prinsip bertanggung jawab; Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, dan harus melaksanakan kewajiban di balik menerima yang menjadi hak-haknya.
4. Prinsip kerja sama; Asuransi juga mengenal adanya prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama tersebut berlaku antara nasabah dan perusahaan asuransi bertugas sebagai pengelola dana dari nasabah. Dalam literatur ekonomi Islam selalu ada prinsip kerja sama. Kerja sama antara nasabah dan perusahaan asuransi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal dari kedua belah pihak..
5. Prinsip saling menanggung risiko; Asuransi syariah menggunakan asas risk sharing, dimana nasabah dan perusahaan saling menanggung risiko. Seluruh nasabah bersama-sama mengumpulkan dana secara sukarela. Dana tersebut berbentuk dimasukkan dalam rekening *tabarru'*.

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

###### **1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

BPRS Mitra Agro Usaha adalah merupakan lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

BPRS Mitra Agro Usaha merupakan konversi dari Bank Konvensional. BPRS Mitra Agro Usaha atau yang sering dikenal dengan BANK MAU adalah satu-satunya di Lampung yang menyandang sebagai Bank “Muallaf” dari BPR Konvensional menjadi BPR Syariah. Beralihnya BPR Mitra Agro Usaha menjadi BPRS Mitra Agro Usaha secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijakan yang membebaskan bank dalam menetapkan tingkat suku bunga. Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga mendapat angin segar dengan adanya Keputusan Gubernur Indonesia Nomor 15/8/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Agro Usaha. Pada tanggal 02 September 2013 mulailah BPRS Mitra Agro Usaha beroperasi dengan sistem atau prinsip syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dokumentasi, *PT. BPRS Mitra Agro Usaha*, 23 Februari 2018.



## 2. Dasar Hukum Berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Berikut dasar hukum berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha:<sup>2</sup>

- a. Persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/155/DKBU tanggal 02 Maret 2009.
- b. Penegasan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia N0. AHU-21384.AH.01.01 Tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009.
- c. Pemberian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 12.17/KEP.GBI/DPG/2010 Tanggal 09 Maret 2010.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/81/KEP.GBI/DPG/2013 Tanggal 23 Juli 2013 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Agro Usaha.
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHA-11535.AH.01.02 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

### 3. Lokasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha

PT. BPRS Mitra Agro Usaha bertempat di Jl. Hayam Wuruk No. 95 Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, 35125, Indonesia. Telp +62 721 258489, Fax +62 721 258754.<sup>3</sup>

### 4. Visi, Misi dan Moto PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Visi, Misi dan Motto PT. BPRS Mitra Agro Usaha antara lain:<sup>4</sup>

- a. Visi: Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.
- b. Misi: Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta pelayanan yang memuaskan.
- c. Motto: *"Kejar Kuantitas Utamakan Kualitas"*.

### 5. Struktur Pemilik dan Pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Struktur Pemilik dan Pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha antara lain:<sup>5</sup>

#### a. Dewan Komisaris

- a) Komisaris Utama : H. Ciknan Sawak
- b) Komisaris Anggota : Ir. H. M. Yusmaridh Etra

#### b. Dewan Direksi

- 1) Direktur Utama : Mat Amin, SE, Akt
- 2) Direktur : Sri Sumarti

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

c. Dewan Pengawas Syariah

1) Ketua : Drs. KH Mawardi AS

2) Anggota : Dr. Alamsyah

d. Manajer Marketing : Agus Handoko

Relationship Officer : Evi Ansori

Sales Officer :

1) Ifra Siswanto

2) Chandra Yanvika Prasetya

3) Muhammad Affandi

4) Tatang Anggara

Funding Officer : Rini Rezeki

Financing Support : Mira Apriliani

e. Manajer Operasional : Agritia Gita Pratiwi

Accounting : Ali Saputra

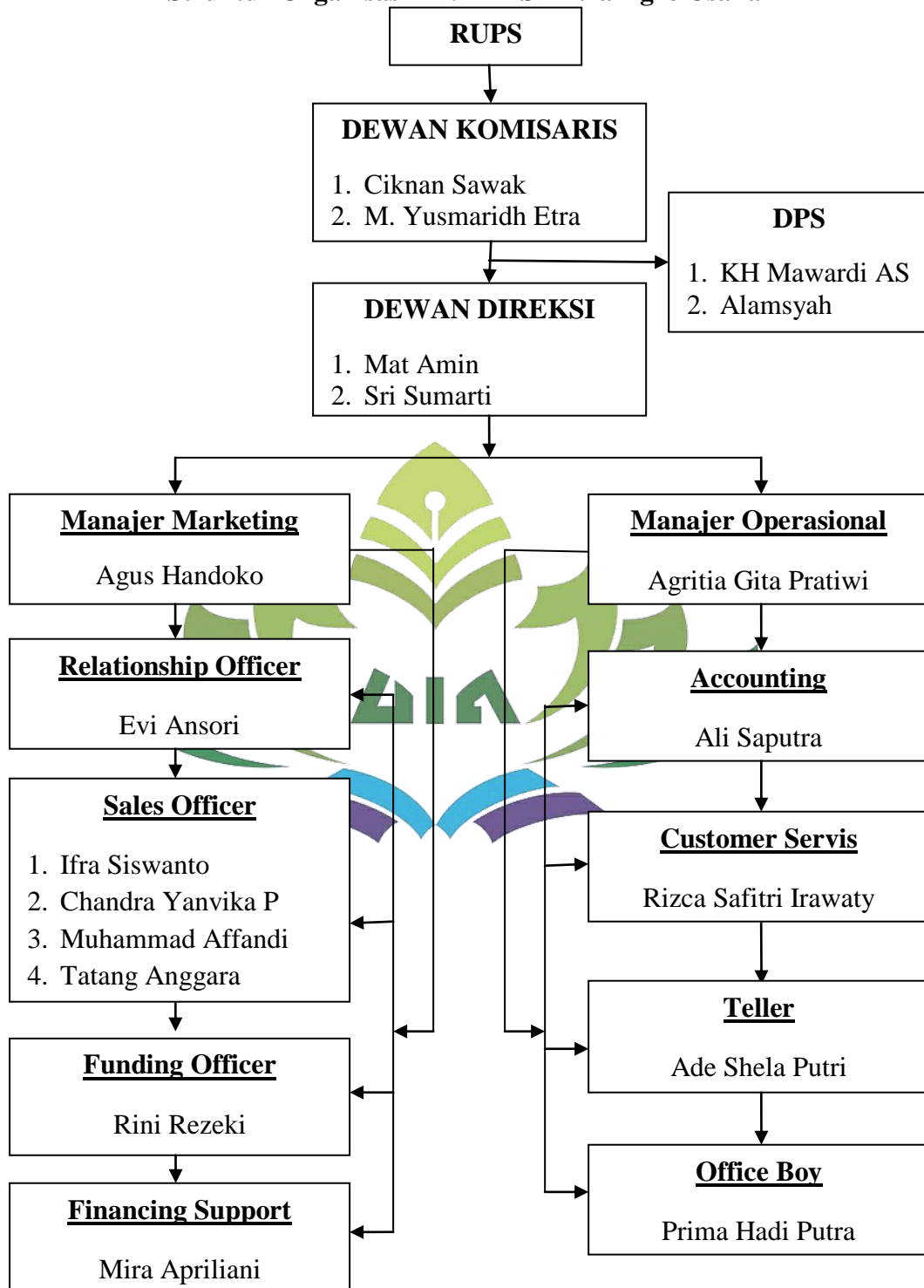
Customer Servis : Rizca Safitri Irawati

Teller : Ade Shela Putri

Office Boy : Prima Hadi Saputra



**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha<sup>6</sup>**



<sup>6</sup>*Ibid.*

#### F. Prinsip Utama PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Dalam melaksanakan usahanya BPRS Mitra Agro Usaha berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Keimanan dan Takwa kepada Allah SWT, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah kedalam kehidupan manusia.
- b. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, visi dan misi semua elemen BPRS Mitra Agro Usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- c. Kekeluargaan, yakni mengelola pengurus serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
- d. Profesionalisme, yaitu dibangunnya rasa semangat kerja yang tinggi, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang sangat baik.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

#### G. Usaha Yang Dijalankan PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Maksud dan tujuan BPRS Mitra Agro Usaha adalah menjalankan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Usaha-usaha yang dijalankan oleh BPRS Mitra Agro Usaha adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, tabungan dan bentuk lainnya berdasarkan wadiah dan mudharabah.
- b. Memberikan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro, kecil, koperasi serta perseorangan maupun kelompok.
- c. Melakukan penyaluran dana.
- d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.
- e. Melakukan kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lain, Bank Umum, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- f. Menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- g. Menjalankan usaha perbankan dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

## H. Produk-Produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Produk-produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha antara lain:<sup>9</sup>

### a. Tabungan MAU Syariah iB:

#### 1) Tabungan MAU Syariah iB berakad *Wadiah*

Tabungan MAU Syariah iB berakad *wadiah* merupakan dana titipan nasabah yang dikelola secara amanah oleh BPRS MAU. BPRS MAU menerima tabungan bebas, dengan akad *wadiah* yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar *profit* kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan pada nasabah, yang diperhitungkan tiap bulan.

Berikut ini adalah keuntungan yang didapatkan saat menabung di BPRS MAU:

- a) Aman, karena terjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- b) Bebas, yaitu bebas biaya administrasi bulanan.
- c) Layanan, layanan yang diberi oleh BPRS MAU adalah dengan jemput bola.
- d) Mendapatkan bonus setiap akhir bulan.

#### 2) Tabungan MAU Syariah iB berakad *Mudharabah*

Tabungan MAU Syariah iB berakad *mudharabah* merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* dimana BPRS MAU bertindak sebagai (*mudharib*) dan nacsabah bertindak sebagai

---

<sup>9</sup>*Ibid.*



pemilik dana (*shahibul mal*). Pada BPRS MAU pembagian keuntungan ditanyakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

### 3) Persyaratan Menabung di BPRS Mitra Agro Usaha

#### a) Persyaratan Perorangan:

- (1) Fotokopi identitas yang masih berlaku.
- (2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- (3) Setoran awal minimal Rp 25.000,- (MAU Syariah iB) dan minimal Rp 10.000,- (MAU Syariah iB Cerdas).
- (4) Setoran berikutnya minimal Rp 10.000,- (MAU Syariah iB) dan minimal Rp 5.000,- (MAU Syariah iB Cerdas).

#### b) Untuk Perusahaan:

- (1) Fotokopi akta pendirian perusahaan / anggaran dasar, berikut AD perubahannya.
- (2) Fotokopi SIUP, SITU, TDP dan NPWP.
- (3) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- (4) Setoran awal minimal Rp 50.000,-.

### 2. Deposito MAU Syariah iB *Mudarabah*

Deposito MAU Syariah iB *Mudharabah* merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah*, dimana BPRS MAU bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Penarikan dana oleh nasabah BPRS MAU hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan BPRS MAU.

1) Keuntungan yang didapat adalah:

- a) Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- b) Bagi hasil yang kompetitif.
- c) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
- d) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan *nisbah* bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat perpanjangan.

2) Persyaratan Deposito MAU Syariah iB:

- a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.
- b) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- c) Setoran minimal Rp 100.000,-.

3. Pembiayaan MAU Syariah iB

1) Pembiayaan MAU Syariah iB *Murabahah*

Pembiayaan MAU Syariah iB *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berkad *murabahah*, dimana BPRS MAU menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + keuntungan pada saat jatuh tempo).

2) Pembiayaan MAU Syariah iB *Multijasa*

Pembiayaan MAU Syariah iB *multijasa* adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*, dimana BPRS MAU memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh

manfaat atas suatu jas. Pembiayaan *multijasa* diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

## **B. Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor**

Asuransi Kendaraan Bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian/berkurangnya nilai secara finansial atas objek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir.

Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, khususnya Pasal 1 ayat (2):

“Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor”.

Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan terhadap risiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai

dengan kondisi yang tercantum dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.<sup>10</sup>

## 2. Jenis Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Secara garis besar, jenis pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:<sup>11</sup>

a. *Comprehensive/All Risk* (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap:

- 1) Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.
- 2) Kerugian keuangan/kerusakan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh lembaga sendiri/orang yang bekerja dengan bertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin bertanggung.
- 3) Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan.
- 4) Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.
- 5) Sambaran petir.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Isty Prisniwi Listiowatie, "Analisa Regulasi Tarif Referensi dalam Industri Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia". *Jurnal Ekonomi*, 2010, h. 76.

b. *Total Loss Only (TLO)* menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut:

- 1) Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
- 2) Akibat pencurian, baik dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum ditemukan.
- 3) Resiko sendiri untuk resiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.

Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan TLO, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan *comprehensive (all risk)*, teranggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat risiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan.<sup>12</sup>

Sebenarnya, pertanggungan untuk kendaraan bermotor telah terstandarisasi, dengan jaminan dan pengecualian seperti tertera dalam PSAKBI (Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia). Risiko yang dijamin dalam asuransi ini adalah kerugian yang

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

disebabkan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir.

Namun dalam perkembangannya, perusahaan asuransi berupaya untuk menarik konsumen dengan memberikan nilai tambah (*value added*) selain dari risiko standar yang disebutkan dalam PSKBI. Pelunasan tersebut dapat meliputi risiko akibat huru hara, kerusakan, terorisme, dan sejenisnya. Beberapa perusahaan lain bahkan memberikan nilai tambah lain seperti layanan derek gratis. Hal tersebut menjadikan persaingan dalam asuransi kendaraan bermotor menjadi semakin ketat. Sebagaimana pula dalam jenis asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor juga menjadi asuransi wajib bagi pembeli kendaraan yang menggunakan fasilitas pembiayaan melalui bank maupun perusahaan pembiayaan.

Dalam masa pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha memberikan asuransi berupa *Total Loss Only (TLO)* yaitu menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan karena kehilangan akibat pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat.

Pertanggungan *Total Loss Only* adalah penanggung baru bertanggungjawab atau suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggungkan mengalami kehilangan seluruhnya. Ini berarti pertanggungan ini hanya menjamin risiko kendaraan secara kerugian total yang disebabkan oleh pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan kasus yang terjadi pada tertanggung

disebabkan oleh pencurian, ini berarti tertanggung berhak menerima klaim dari penanggung.

Dalam penyelesaian klaim *Total Loss Only* yang berlaku adalah harga pasar kendaraan sejenis dengan jumlah penggantian maksimum harga pertanggungan, yang dimaksud harga pasar adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh tertanggung dipenjualan atas kendaraan tersebut sebelum kendaraan itu hilang.

### 3. Syarat-syarat Pengajuan Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Asuransi dan Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Asuransi dijalankan dengan menggunakan aturan main yang sudah tercantum di dalam polis asuransi. Untuk menghindari penolakan klaim bagi nasabah asuransi, maka perlu diberikan pemahaman tentang syarat petanggungan.

Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Untuk memahami syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD yang berlaku juga



pada asuransi kendaraan bermotor, berikut ini disajikan syarat-syarat umum tersebut:

- a. Hari dan tanggal kapan serta tempat dimana asuransi kendaraan bermotor diadakan.
- b. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau kepentingan pihak ketiga.
- c. Keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung.
- d. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung.
- e. *Evenemen-evenemen* penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung.
- f. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung.
- g. Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung.
- h. Janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung.

Di dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor.

- b. Pembayaran premi
  - c. Pemberitahuan kecelakaan, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hal ganti kerugian.
  - d. Perselisihan dan arbitrase.
  - e. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.
4. Risiko-risiko yang Dijamin dan Tidak Dijamin Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Didalam polis asuransi tertanggung harus memahami tentang risiko apa saja yang dijamin dan tidak dijamin. Yang dijamin oleh Asuransi Kendaraan Bermotor secara umum adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Kerugian atau Kerusakan Kendaraan Bermotor. Dalam asuransi kendaraan bermotor ini risiko yang dipertanggungkan disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan yang bersangkutan.
- b. Perbuatan jahat orang lain.
- c. Pencurian.
- d. Kebakaran.
- e. Sambaran petir.
- f. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa di atas dan sebab-sebab lainnya selama penyebrangan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

dengan kapal feri atau alat penyebrangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- g. Kerusakan roda yang disebabkan oleh kecelakaan.
- h. Biaya yang wajar yang dikeluarkan tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian maksimum sebesar 0,5% dari jumlah pertanggungan.

5. **Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

Prosedur penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha sesuai dengan hasil penelitian Ade Hari Siswanto bahwa dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) yang harus dipenuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Langkah-langkah yang harus dilakukan tertanggung, yaitu:
  - 1) Melaporkan terjadinya peristiwa kerugian pada penanggung selambat-lambatnya 3 hari sejak terjadinya peristiwa kerugian tersebut. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis atau secara lisan kepada penanggung.
  - 2) Mengambil tindakan yang dapat mencegah meluasnya kerugian.

---

<sup>14</sup>Ade Hari Siswanto, "Penyelesaian Klaim Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)". *Lex Jurnalica*, Vol. 2 No. 3 (Agustus 2009), h. 140-141.

- 3) Mengamankan objek yang mengalami kerugian.
- 4) Meneliti polis asuransi, meliputi jangka waktu, objek asuransi, pelunasan premi, pemenuhan persyaratan polis.
- 5) Mengajukan tuntutan ganti rugi yang disertai dokumen dan informasi lengkap pada penanggung. Tertanggung melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya pos polisi (Pospol) setempat. Khusus untuk kerugian total akibat pencurian, tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapatkan surat keterangan dari polisi daerah (Polda) setempat.

b. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggung, yaitu:

- 1) Menerima laporan terjadinya kerugian dari tertanggung.
- 2) Melakukan survey klaim ke lokasi objek yang mengalami kerugian.
- 3) Meminta dokumen dan informasi yang dibutuhkan kepada tertanggung.
- 4) Meneliti keabsahan polis dan klaim serta menghitung nilai kerugian.
- 5) Memberikan keputusan klaim apakah diterima apa ditolak.
- 6) Membayar ganti rugi kepada tertanggung dalam waktu paling lambat 30 hari sejak adanya kesepakatan jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

### **C. Alur Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

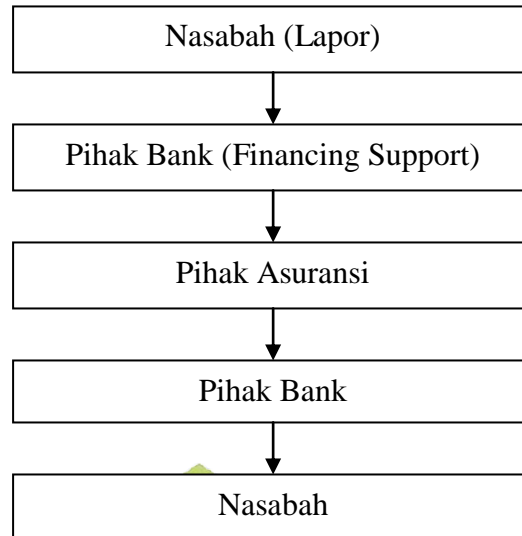
Beberapa alur prosedur asuransi kendaraan bermotor antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Nasabah segera melaporkan terjadinya peristiwa klaim paling lambat 3 x 24 jam (hari kerja) sejak kejadian.
2. Pelaporan dapat secara lisan, via telepon atau via surat, ditujukan pada bagian pihak bank (Financing Support). Dan melakukan pengecekan polis serta survey kerugian.
3. Nasabah membawa dokumen klaim berupa copy bukti pelunasan premi, copy SIM pengemudi, copy STNK serta copy Polis Asuransi Kendaraan Bermotor untuk diserahkan pada pihak asuransi.
4. Pencairan, apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan asuransi kepada nasabah dapat diberikan melalui transfer ke pihak bank.
5. Setelah pencarian dari pihak asuransi ke pihak bank, selanjutnya pihak bank memberikan pencairan asuransinya kepada nasabah.

---

<sup>15</sup>Wawancara, Agritia Gita Pratiwi, Manajer Operasional PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 12 Februari 2018.

**Gambar 3.2**  
**Prosedur Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor**  
**Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha<sup>16</sup>**



Berdasarkan gambar 3.2 mengenai prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha pertama nasabah diwajibkan untuk melaporkan semua peristiwa yang merugikan dalam waktu 3x24 jam, baik secara lisan (telepon) atau datang langsung ataupun secara tulisan (surat) yang ditujukan kepada pihak bank bagian *financing support*. Setelah menerima laporan klaim dari nasabah, bagian *financing support* segera melakukan cek polis. Apabila pemeriksaan polis diterima dan kerugian tersebut tercover maka akan melanjutkan *survey* ke lokasi kerugian (sesegera mungkin agar hasilnya akurat dan objek klaim belum berubah, sehingga dapat meminimise klaim). Mewawancari pihak nasabah tentang penyebab dan taksiran kerugian yang diderita. Mengumpulkan informasi tambahan dari saksi mata yang berada di lokasi kerugian pada

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

saat terjadi kehilangan. Meminta nasabah secepatnya melengkapi dokumen klaim berupa copy bukti pelunasan premi, copy SIM pengemudi, copy STNK serta copy Polis Asuransi Kendaraan Bermotor untuk diserahkan pada pihak asuransi. Pihak yang menentukan klaim adalah pihak asuransi, yang mana pihak asuransi segera memberikan konfirmasi kepada nasabah tentang jumlah kerugian yang akan dibayarkan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan asuransi kepada nasabah dapat diberikan melalui transfer ke pihak bank kemudian diteruskan dari pihak bank memberikan pencairan asuransinya kepada nasabah.

Contoh kasus: Bapak Nurwahyudi melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan cara mengambil pembiayaan dari PT. BPRS Mitra Agro Usaha, dan PT. BPRS Mitra Agro Usaha telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. JASINDO cabang Lampung untuk menjadi mitranya dalam asuransi kendaraan bermotor, maka dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut segala kerugian yang dialami oleh tertanggung atau nasabah nantinya akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan asuransi.



#### 4) Tingkat Pembiayaan PT.BPRS Mitra Agro Usaha

**Tabel 3.1**  
**Data Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha**  
**Tahun 2015 s.d 2017<sup>17</sup>**

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
Pembiayaan Murabahah	209	296	323
a. Motor	7	9	10
b. Mobil	5	9	17
Pembiayaan Multijasa	66	87	107
Jumlah Nasabah	287	401	457

*Sumber Data: PT. BPRS Mitra Agro Usaha (data diolah kembali)*

Berdasarkan tabel 3.1 data pembiayaan PT.BPRS Mitra Agro Usaha tahun 2015 s.d 2017 semakin meningkat. Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan seluruhnya berjumlah 287 nasabah yang terdiri dari 66 nasabah pembiayaan multijasa, 209 nasabah pembiayaan murabahah yang meliputi 7 nasabah motor dan 5 nasabah mobil. Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan seluruhnya berjumlah 401 nasabah yang terdiri dari 87 nasabah pembiayaan multijasa, 296 nasabah pembiayaan murabahah yang meliputi 9 nasabah motor dan 9 nasabah mobil. Pada tahun 2017 pembiayaan seluruhnya berjumlah 457 nasabah yang terdiri dari 107 nasabah pembiayaan multijasa, 323 nasabah pembiayaan murabahah yang meliputi 10 nasabah motor dan 17 nasabah mobil. Meningkatnya sektor pembiayaan kendaraan bermotor semakin meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk membeli kendaraan baru. Besarnya jumlah kalangan juga membuat permintaan akan kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya untuk kategori mobil maupun motor.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Asuransi kerugian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Ada beberapa hal tentang asuransi yang harus dipahami oleh nasabah sebelum disetujuinya pembiayaan kendaraan bermotor, diantaranya adalah bagaimana asuransi yang diterapkan bank, pembayaran premi serta klaim asuransinya. Khususnya pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT. BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan asuransi pembiayaannya dalam bentuk asuransi kerugian sebagai pengalihan risikonya dimana jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan *Total Loss Only* (TLO) yang menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan karena kehilangan atas pencurian.

PT. BPRS Mitra Agro Usaha telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. JASINDO cabang Lampung untuk menjadi mitranya dalam asuransi kendaraan bermotor.

Berdasarkan wawancara kepada narasumber pertama, yaitu pihak bank, Ibu Gita bagian Manajer Operasional bahwasanya:

“Bank MAU Syariah hanya sebagai pengguna takaful mbak, dan PT. JASINDO sebagai brokernya, jadi seolah-olah kita bertanggung jawab atas nasabah dalam asuransi kendaraan bermotor ini, Bank MAU Syariah mencover pembiayaan kendaraan bermotornya dengan asuransi, yaitu asuransi kerugian. Untuk pendaftarannya dan lain-lain sebenarnya nasabah tidak ada hubungan langsung dengan pihak asuransi, tapi meskipun ada yang nasabahnya langsung ke asuransinya, padahal sebenarnya ke bank saja sudah bisa”.<sup>1</sup>

Jadi hasil wawancara diatas dalam pembiayaan kendaraan bermotor ini, nasabah tidak berhubungan dengan lembaga asuransi, hanya sekedar tahu bahwa pembiayaannya dibawahtangani oleh asuransi, dan nasabah harus membayar biaya (premi asuransi). Karena yang dinyatakan sebagai pengguna asuransi disini adalah pihak bank. Adapun syarat-syarat untuk pengajuan juga telah disediakan oleh pihak bank misalnya fotokopi identitas nasabah dan lainnya yang telah dilengkapi nasabah pada saat melampirkan dokumen-dokumen pada saat pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor.

Pada asuransi kendaraan bermotor ini, karena pihak bank hanya sebagai pengguna, maka pihak bank pun tidak mendapat keuntungan dari lembaga asuransi dalam asuransi kendaraan bermotor ini, hal ini juga dijelaskan oleh narasumber pihak bank, Ibu Gita bagian Manajer Operasional sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Wawancara, Agritia Gita Pratiwi, Manajer Operasional PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 12 Februari 2018.

“Jadi bahkan untuk keuntungan, bank juga tidak mendapat bagian keuntungan dari pihak asuransi, karena bank hanya sebagai pengguna, hanya saja asuransi punya rekening disini dan tabungannya banyak, bisa sampai milyaran, jadi masuk dana pihak ketiga”.<sup>2</sup>

Hasil wawancara diatas dijelaskan pihak bank hanya sebagai pengguna, maka pihak bank pun tidak mendapat keuntungan dari lembaga asuransi dalam asuransi kendaraan bermotor ini saja dana yang dimiliki lembaga asuransi untuk dikelola dimasukkan ke rekening Bank MAU Syariah sebagai DPK (Dana Pihak Ketiga) yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat maupun lembaga yang merupakan sumber dana andalan bank yang akan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Kemudian pada asuransi kendaraan bermotor ini, selain nasabah diharapkan mengetahui atau memahami hal mengenai asuransi kendaraan bermotornya, nasabah juga harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam asuransi ini, yaitu kewajiban membayar premi dan mendapatkan hak dari klaim asuransi bagi nasabah yang tertimpa musibah maupun tidak.

#### 1. Penerapan Asuransi Kerugian Pada Motor

Apabila terjadi kehilangan pada nasabah dalam masa pembiayaan, pihak bank menerapkan asuransi pembiayaannya dalam bentuk asuransi kerugian sebagai pengalihan risikonya dimana jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan *Total Loss Only* (TLO) yang menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan karena kehilangan atas

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

pencurian. Jadi misalkan terjadi kehilangan pada motor pihak bank memberikan asuransi sebagai pengalihan risiko.

Syarat-syarat pengajuan asuransi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah *copy* STNK, asli BPKB, *copy* SIM, asli laporan pengaduan kehilangan dari kepolisian, asli surat keterangan kepolisian daerah (Kapolda)/ kaditserse, asli berita acara pemeriksaan dari kepolisian, asli surat keterangan pemblokiran STNK dari kepolisian dan *copy* KTP pemilik.

Cara pembayaran premi untuk asuransi motor iyalah pada saat awal sebelum pembiayaan berjalan. Dan pembayaran nilai premi sesuai dengan harga jual motor saat ini dikalikan dengan suku premi dalam bentuk persen selama setahun dan ditambahkan dengan biaya administrasi.

Sejauh ini dalam setahun sudah ada 4 nasabah yang mengajukan klaim kehilangan pada pembiayaan motor nya, semua nya hampir rata-rata kehilangan disebabkan nasabah sedang berada di tempat perbelanjaan.

Prosedur PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam memberikan klaim asuransi adalah pertama nasabah melaporkan kejadian kehilangan dan mengajukan klaim dengan melengkapi syarat-syarat dan dokumen. Kedua apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi maka yang selanjutnya adalah pengisian formulir klaim, setelah dilakukan pengisian formulir klaim maka pihak bertanggung wajib menyerahkan

dokumen-dokumen tersebut yang kemudian diserahkan kepada penanggung sebagai syarat mengajukan klaim. Ketiga adalah pemeriksaan di lapangan untuk membuktikan laporan dari pihak tertanggung, apakah kehilangan yang terjadi termasuk kehilangan yang diperjanjikan dalam polis atau disebabkan oleh kesalahan sendiri atautkah ada subrogasi dari pihak ketiga, karena apabila tidak sesuai dengan polis dan disebabkan oleh kesalahan sendiri atau telah ada subrogasi maka pihak penanggung berhak untuk tidak memberikan klaim. Keempat adalah pembayaran klaim, bahwasanya persoalan kehilangan erat sekali hubungannya dengan persoalan klaim, tetapi tidak setiap kerugian dari kehilangan harus mendapatkan klaim. Harus dilihat terlebih dahulu apakah kehilangan yang terjadi itu adalah kehilangan yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis. Berdasarkan hasil kesimpulan dari tim investigasi penanggung bahwa kehilangan yang terjadi pada tertanggung adalah tertanggung layak untuk mendapatkan klaim.

Berdasarkan hasil penelitian pada penanggung menyatakan bahwa berdasarkan luas jaminan yang ditandatangani dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung, maka klaimnya adalah *Total Loss Only*. Pertanggungan *Total Loss Only* adalah penanggung baru bertanggungjawab atau suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggungkan mengalami kerusakan seluruhnya. Ini berarti pertanggungan ini hanya menjamin risiko kendaraan secara

kerugian total yang disebabkan oleh pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan kasus yang terjadi pada tertanggung disebabkan oleh pencurian, ini berarti tertanggung berhak menerima klaim dari penanggung.

Asuransi *Total Loss Only* pada motor diberikan pada motor yang hilang dalam kondisi diparkir (pencurian pada saat motor diam), pencurian, perampasan atau penodongan,.

Dalam penyelesaian klaim *Total Loss Only* yang berlaku adalah harga pasar kendaraan sejenis dengan jumlah penggantian maksimum harga pertanggungan, yang dimaksud harga pasar adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh tertanggung dipenjualan atas kendaraan tersebut sebelum kendaraan itu hilang.

## 2. Penerapan Asuransi Kerugian Pada Mobil

Apabila terjadi kehilangan pada nasabah dalam masa pembiayaan, pihak bank menerapkan asuransi pembiayaannya dalam bentuk asuransi kerugian sebagai pengalihan risikonya dimana jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan *Total Loss Only* (TLO) yang menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan karena kehilangan atas pencurian. Jadi misalkan terjadi kehilangan pada motor pihak bank memberikan asuransi sebagai pengalihan risiko.



Syarat-syarat pengajuan asuransi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah *copy* STNK, asli BPKB, *copy* SIM, asli laporan pengaduan kehilangan dari kepolisian, asli surat keterangan kepolisian daerah (Kapolda)/ kaditserse, asli berita acara pemeriksaan dari kepolisian, asli surat keterangan pemblokiran STNK dari kepolisian dan *copy* KTP pemilik.

Cara pembayaran premi untuk asuransi mobil iyalah pada saat awal sebelum pembiayaan berjalan. Dan pembayaran nilai premi sesuai dengan harga jual mobil saat ini dikalikan dengan suku premi dalam bentuk persen selama setahun dan ditambahkan dengan biaya administrasi.

Sejauh ini dalam setahun belum ada nasabah yang mengajukan klaim kehilangan pada pembiayaan mobil nya.

Prosedur PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam memberikan klaim asuransi adalah pertama nasabah melaporkan kejadian kehilangan dan mengajukan klaim dengan melengkapi syarat-syarat dan dokumen. Kedua apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi maka yang selanjutnya adalah pengisian formulir klaim, setelah dilakukan pengisian formulir klaim maka pihak bertanggung wajib menyerahkan dokumen-dokumen tersebut yang kemudian diserahkan kepada penanggung sebagai syarat mengajukan klaim. Ketiga adalah pemeriksaan di lapangan untuk membuktikan laporan dari pihak bertanggung, apakah kehilangan yang terjadi termasuk kehilangan

yang diperjanjikan dalam polis atau disebabkan oleh kesalahan sendiri ataukah ada subrogasi dari pihak ketiga, karena apabila tidak sesuai dengan polis dan disebabkan oleh kesalahan sendiri atau telah ada subrogasi maka pihak penanggung berhak untuk tidak memberikan klaim. Keempat adalah pembayaran klaim, bahwasanya persoalan kehilangan erat sekali hubungannya dengan persoalan klaim, tetapi tidak setiap kerugian dari kehilangan harus mendapatkan klaim. Harus dilihat terlebih dahulu apakah kehilangan yang terjadi itu adalah kehilangan yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis. Berdasarkan hasil kesimpulan dari tim investigasi penanggung bahwa kehilangan yang terjadi pada tertanggung adalah tertanggung layak untuk mendapatkan klaim.

Berdasarkan hasil penelitian pada penanggung menyatakan bahwa berdasarkan luas jaminan yang ditandatangani dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung, maka klaimnya adalah *Total Loss Only*. Pertanggungan *Total Loss Only* adalah penanggung baru bertanggungjawab atau suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggungkan mengalami kerusakan seluruhnya. Ini berarti pertanggungan ini hanya menjamin risiko kendaraan secara kerugian total yang disebabkan oleh pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan kasus yang terjadi pada tertanggung disebabkan oleh pencurian, ini berarti tertanggung berhak menerima klaim dari penanggung.

Asuransi *Total Loss Only* biasanya disarankan saat membeli mobil baru secara pembiayaan, dengan premi yang sudah menjadi satu dengan pembayaran pertama. Harga premi akan semakin rendah, jika masa angsuran pembiayaan lebih cepat.

Dalam penyelesaian klaim *Total Loss Only* yang berlaku adalah harga pasar kendaraan sejenis dengan jumlah penggantian maksimum harga pertanggungan, yang dimaksud harga pasar adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh tertanggung dipenjualan atas kendaraan tersebut sebelum kendaraan itu hilang.

## **B. Premi**

Premi adalah jumlah biaya yang harus dibayar oleh nasabah sebagai biaya pertanggungan dan merupakan prasyarat adanya perjanjian asuransi, karena tanpa adanya premi maka tidak akan ada asuransi. Setiap premi yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus/*tabarru'* yaitu rekening yang diniatkan dan digunakan untuk membayar klaim kepada nasabah yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor.

Berdasarkan wawancara kepada narasumber kedua pihak financing support pada tanggal 14 Maret 2018 bahwasanya:

“Pembayaran premi dalam pembiayaan kendaraan bermotor ini hanya dilakukan pada awal atau sebelum pembiayaan berjalan, nilai preminya sangat sedikit, jadi tidak ada angsuran premi. Jika nasabah belum membayar asuransi, maka tidak jadi pembiayaan, karena bank

tidak mau mengambil risiko untuk merealisasikan pembiayaannya bagi yang belum membayar asuransi”.<sup>3</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Mira dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran premi pada pembiayaan kendaraan bermotor hanya dilakukan pada satu kali pembayaran, dan itu dilakukan pada awal atau sebelum pembiayaan berjalan. Nilai preminya pun sangat sedikit, dan dibayarkan pada awal pembiayaan jadi tidak ada angsuran premi lagi yang dibayarkan. Jika dari biaya-biaya tersebut ada yang belum lunas maka pihak bank belum bisa merealisasikan pembiayaan kendaraan bermotor nya, karena akan sangat berisiko bagi pihak bank jika terjadi musibah yang akan terjadi.

Kemudian dijelaskan juga oleh narasumber bahwasanya :

“Untuk pembayaran preminya tidak jadi satu dengan pembayaran pembiayaannya, jadi sebelum pembiayaan berjalan, ada namanya biaya-biaya sebelum realisasi yang harus dibayar oleh nasabah, di dalamnya termasuk biaya asuransi, sebelum biaya-biaya tersebut dibayar semua, maka untuk pembiayaannya akan dibatalkan.”<sup>4</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Mira dapat dijelaskan bahwa pembayaran premi tidak dijadikan satu dengan pembayaran pembiayaannya, karena dianggap sebagai biaya lain-lain. Jadi tidak dicampur adukkan dengan pembiayaannya nasabah, sebelum biaya-biaya tersebut dibayar semua, maka untuk pembiayaannya akan dibatalkan.

Sedang nilai premi yang ditanggung nasabah juga dijelaskan bahwasanya:

---

<sup>3</sup>Wawancara, Mira Apriliani, Financing Support PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 14 Maret 2018.

<sup>4</sup>*Ibid.*

“Pembayaran premi sesuai dengan harga jual kendaraan bermotor saat ini dikalikan dengan suku premi dalam bentuk persen selama setahun dan ditambahkan dengan biaya administrasi”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa nilai premi yang ditanggung nasabah juga bisa ditetapkan sesuai harga jual kendaraan bermotor saat ini dikalikan dengan suku premi dalam bentuk persen selama setahun dan ditambahkan dengan biaya administrasi. Suku premi merupakan persenan yang sudah ditentukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Persenan OJK ini sebenarnya juga berpengaruh dengan besarnya risiko pada setiap motor yaitu semakin tinggi nilai motor, semakin tinggi pula risiko kehilangannya, maka semakin tinggi pula persenan preminya.

### C. Klaim

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening tabarru', yaitu tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara kepada pihak financing support, tentang klaim bahwasanya:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Fatwa DSN No:21/DSN-MUI/X/2001

“Sejauh ini dalam setahun untuk jenis motor sudah ada 4 nasabah mbak yang mengajukan klaim kehilangan pada pembiayaan kendaraan bermotor nya, semua nya hampir rata-rata kehilangan disebabkan nasabah sedang berada di tempat perbelanjaan. Sedangkan untuk jenis mobil belum ada nasabah yang mengajukan klaim”.<sup>7</sup>

Hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa untuk klaim kehilangan pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT. BPRS Mitra Agro Usaha sampai sejauh ini dalam setahun sudah ada 4, rata-rata kehilangan semuanya itu dikarenakan nasabah sedang berada di tempat perbelanjaan. Dan sering sekali terdengar bahwa rawan terjadi kehilangan ditempat perbelanjaan seperti itu. Sedangkan untuk jenis mobil belum ada nasabah yang mengajukan klaim.

Pihak financing support juga menjelaskan bahwasanya:

“Ketika dia/nasabah mengalami kehilangan, yang dibayar oleh asuransi adalah sisa pembiayaannya. Misalkan pembiayaannya sebesar 10 juta, pembayaran pembiayaan akan lebih dari 10 juta, dan jika nasabah mengalami kehilangan pada masa pembiayaannya maka yang dilunasi oleh pihak asuransi adalah sisa dari pokok pinjaman dari 10 juta itu saja.”<sup>8</sup>

Hasil wawancara dijelaskan bahwa pada musibah kehilangan, yang ditanggung oleh pihak asuransi adalah sisa pokok dari jumlah pembiayaannya. Jadi jika nasabah mengalami kehilangan pada masa pembiayaan pihak asuransi akan mengganti/melunasi sisa dari pokok pembiayaan yang masih ada di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

---

<sup>7</sup>Wawancara, Mira Apriliani, Financing Support PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 14 Maret 2018

<sup>8</sup>*Ibid.*

Selanjutnya untuk mengetahui syarat-syarat apa sajakah untuk mengajukan klaim asuransi, narasumber ketiga pihak sales officer menjelaskan bahwasanya:

“Syarat-syarat untuk mengajukan klaim seperti: *copy* STNK, asli BPKB, *copy* SIM, asli laporan pengaduan kehilangan dari kepolisian, asli surat keterangan kepolisian daerah (Kapolda)/ kaditserse, asli berita acara pemeriksaan dari kepolisian, asli surat keterangan pemblokiran STNK dari kepolisian dan *copy* KTP pemilik”.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwasanya syarat-syarat untuk mengajukan klaim sesuai dengan syarat-syarat dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yaitu *copy* STNK, asli BPKB, *copy* SIM, asli laporan pengaduan kehilangan dari kepolisian daerah (Kapolda), asli berita acara pemeriksaan dari kepolisian, asli surat keterangan pemblokiran STNK dari kepolisian dan *copy* KTP pemilik.

Dan ini sesuai dengan hasil penelitian Ade Hari Siswanto bahwa dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) prosedur penyelesaian klaim asuransi yang harus oleh tertanggung, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Langkah-langkah yang harus dilakukan tertanggung, yaitu:

1. Melaporkan terjadinya peristiwa kerugian pada penanggung selambat-lambatnya 3 hari sejak terjadinya peristiwa kerugian tersebut. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis atau secara lisan kepada penanggung.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Ade Hari Siswanto, “Penyelesaian Klaim Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)”. *Lex Jurnalica*, Vol. 2 No. 3 (Agustus 2009), h. 140-141.



2. Mengambil tindakan yang dapat mencegah meluasnya kerugian.
3. Mengamankan objek yang mengalami kerugian.
4. Meneliti polis asuransi, meliputi jangka waktu, objek asuransi, pelunasan premi, pemenuhan persyaratan polis.
5. Mengajukan tuntutan ganti rugi yang disertai dokumen dan informasi lengkap pada penanggung. Tertanggung melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya pos polisi (Pospol) setempat. Khusus untuk kerugian total akibat pencurian, tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapatkan surat keterangan dari polisi daerah (Polda) setempat.

Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh tertanggung. Untuk mengajukan klaim tersebut maka dapat langsung menghubungi PT. BPRS Mitra Agro Usaha untuk memperoleh hak dengan meminta surat pengajuan klaim serta melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.

Dalam pengurusan klaim di PT. BPRS Mitra Agro Usaha, setelah nasabah atau pihak tertanggung melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak bank tersebut, kemudian akan diteliti lebih lanjut oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha mengenai kebenaran klaim asuransi tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dapat memakan waktu relatif panjang apabila wilayah atau tempat terjadi kehilangan pada kendaraan tertanggung tidak mudah dijangkau.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber keempat yaitu nasabah mengenai tentang adanya asuransi dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tanggapan Responden Mengenai Adanya Asuransi Dalam Pembiayaan**  
**Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tahu	20	100%
2	Tidak Tahu	0	0
Jumlah		20 Nasabah	100%

*Sumber: Hasil wawancara dengan nasabah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 orang nasabah (100% nasabah) mengatakan tahu tentang adanya asuransi dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Dan 0 nasabah mengatakan tidak tahu tentang adanya asuransi dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah mengetahui tentang adanya asuransi pada pembiayaan kendaraan bermotor.

Untuk mengetahui tanggapan nasabah mengenai adanya informasi yang diberikan dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tanggapan Responden Mengenai Adanya Informasi yang Diberikan Dalam**  
**Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor**  
**Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	20	100%
2	Tidak	0	0
Jumlah		20 Nasabah	100%

*Sumber: Hasil wawancara dengan nasabah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 orang nasabah (100% nasabah) mengatakan nasabah diberi informasi dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Dan 0 nasabah mengatakan tidak diberikan informasi dalam pengajuan klaim pada asuransi kendaraan bermotor. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak bank memberikan informasi kepada nasabah pada saat awal mengajukan pembiayaan.

Untuk mengetahui tanggapan mengenai pelaksanaan dalam klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Dalam Klaim Asuransi**  
**Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat mudah	0	0%
2	Mudah	16	80%
3	Tidak Mudah	4	20%
Jumlah		20 Nasabah	100%

*Sumber: Hasil wawancara dengan nasabah*

Dari tabel diatas bahwa 0 nasabah berpendapat sangat mudah. Kemudian 16 orang nasabah (80% nasabah) berpendapat pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha mudah. Dan 4 orang nasabah (20% nasabah) berpendapat bahwa pelaksanaan klaim tidak mudah.

Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada nasabah yang berpendapat tidak mudah dalam pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Hal ini disebabkan

hambatan-hambatan yang dihadapi pihak nasabah. Ada beberapa hambatan yang dihadapi pihak nasabah dalam pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor sehingga seringkali hal tersebut memperlambat proses penyelesaian klaim diantaranya:<sup>11</sup>

1. Dokumen yang tidak lengkap.
2. Hilangnya polis asuransi atau kwitansi bukti pembayaran premi.
3. Penyelesaian dengan pihak yang berwajib.
4. Lokasi kejadian yang jauh.

Adapun upaya yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha guna mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi, adalah meminta calon tertanggung untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya mengenai hal-hal yang dibutuhkan pada saat calon tertanggung maupun pada saat pengajuan klaim, pihak bank akan memberikan informasi yang selengkap-lengkapny dokumen dan apabila terjadi kehilangan polis atau kwitansi pembayaran premi, maka bank akan mencari cadangan datanya. Dan meminta konfirmasi mengenai sejauh mana kelengkapan dokumen atau urusan dengan pihak berwajib.

Hal ini juga diperkuat oleh salah seorang nasabah yaitu ibu Susi R, yang mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan pembayaran klaim terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank, baik dokumen dari pihak kepolisian, karena dokumen tersebut merupakan syarat klaim. Berikut hasil wawancara dengan nasabah:

---

<sup>11</sup>Wawancara, Tatang Anggara, Sales Officer PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 15 Maret 2018

“Bahwa sebelum pelaksanaan pembayaran klaim terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank, baik dokumen dari pihak kepolisian, karena dokumen tersebut merupakan syarat klaim”.<sup>12</sup>

Dalam hal ini ibu Dyah Ayu Larasati juga mengungkapkan hal yang sama.<sup>13</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Tanggapan Responden Mengenai Berapa Lama Waktu Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	< 3 hari	0	0%
2	3-10 hari	16	80%
3	> 10 hari	4	20%
Jumlah		20 Nasabah	100%

*Sumber: Hasil wawancara dengan nasabah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 16 orang nasabah (80% nasabah) mengatakan 3-10 hari waktu yang dibutuhkan pihak bank dalam penyelesaian pelaksanaan klaim kendaraan bermotor. Dan 4 orang nasabah (20% nasabah) mengatakan lebih dari 10 hari. Kemudian 0 nasabah (0% nasabah) mengatakan kurang dari 3 hari.

Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan klaim yang membutuhkan waktu 3-10 hari untuk diselesaikan pihak bank. Dan pelaksanaan klaim yang membutuhkan waktu lebih dari 10 hari ini terjadi

<sup>12</sup>Wawancara, Susi R, Nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 15 Maret 2018

<sup>13</sup>Wawancara, Dyah Ayu Larasati, Nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 14 Maret 2018

karena hambatan dari pengajuan klaim seperti lokasi kehilangan kendaraan bermotor atau keadaan lainnya.

Untuk mengetahui tanggapan mengenai puas tidaknya nasabah dalam pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kepuasan Nasabah Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat puas	2	10%
2	Puas	17	85%
3	Tidak puas	1	5%
Jumlah		20 Nasabah	100%

*Sumber: Hasil wawancara dengan nasabah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 orang nasabah (10% nasabah) mengatakan sangat puas, 17 orang nasabah (85% nasabah) mengatakan puas, dan 1 orang nasabah (5% nasabah) mengatakan tidak puas. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa nasabah cukup puas dalam pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

Dan untuk mengetahui bagaimana peningkatan pelayanan pelaksanaan yang sekarang jika dibandingkan dengan sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Tanggapan Responden Mengenai Peningkatan Pelayanan Dalam**  
**Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor**  
**Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Meningkat	17	85%
2	Makin Buruk	0	0%
3	Sama saja	3	15%
Jumlah		20 Nasabah	100%

*Sumber: Hasil wawancara dengan nasabah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 17 orang nasabah (85% nasabah) mengatakan adanya peningkatan dan 0 nasabah (0% nasabah) mengatakan makin buruk, kemudian 3 orang nasabah (15% nasabah) mengatakan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha sama saja. Untuk itu disimpulkan bahwa secara umum ada peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan klaim kendaraan bermotor di PT. BPRS Mitra agro Usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dari kesepuluh nasabah peneliti mendapati data berupa pernyataan dari nasabah. Dari kedelapan narasumber yakni nasabah menyatakan prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaannya pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai. Namun ada beberapa hambatan yang dihadapi pihak bank dan nasabah yang tidak ada di dalam prosedur pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor sehingga memperlambat pelaksanaan penyelesaian seperti: ketidaklengkapan dokumen, hilangnya polis/ kwitansi bukti pembayaran premi, hubungan dengan pihak berwajib, lokasi kejadian yang jauh. Namun pihak bank juga berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan mengetahui sebenarnya kronologis kehilangan tersebut, memberikan



informasi selengkap-lengkapnnya kepada nasabah, dan berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah atau pihak bertanggung.

Dari kedua pernyataan nasabah berdasarkan keabsahan data, maka pernyataan nasabah pertama dan ketiga dibenarkan adanya. Nasabah harus melengkapi dokumen-dokumen klaim asuransi kendaraan bermotor pembiayaan syariah yang kemudian akan dikirim oleh pihak bank agar segera ditindak lanjuti oleh pihak asuransi. Untuk selebihnya pihak bank hanya mempunyai kewajiban memproses penutupan pembiayaannya ketika dana sisa pokok pembiayaan telah dicairkan oleh pihak asuransi.

Kemudian jika sampai pada masa akhir pembiayaan tidak terjadi klaim, maka dana akan dikembalikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan lembaga asuransi syariah/takaful bahwasanya jika tidak terjadi klaim maka ada pengembalian premi, tetapi tidak bernilai 100%, ada ketentuan sendiri dari lembaga asuransi.

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh narasumber dari pihak Manajer Operasional, Ibu Gita sebagai berikut:

“Untuk nasabah jika tidak terjadi musibah, bisa mengklaim ke pihak asuransi atau kata lainnya terjadi revan yaitu pengembalian premi tetapi bukan 100%, tergantung dari pihak asuransinya”.<sup>14</sup>

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa jika tidak terjadi kehilangan pada nasabah dalam masa pembiayaan, nasabah bisa mengajukan revan atau pengembalian kepada pihak asuransi tetapi pengembalian premi bukan 100%, tergantung dari pihak asuransinya.

---

<sup>14</sup>Wawancara, Agritia Gita Pratiwi, Manajer Operasional PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 12 Februari 2018.

#### **D. Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Manusia adalah sebagai makhluk sosial saling bergantung satu sama lain. Sebagai makhluk yang lemah, manusia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain atau sesamanya. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari adanya musibah dan marabahaya, sudah sepatutnya sesama muslim wajib membantu muslim lainnya apabila membutuhkan pertolongan. Sebagaimana dalam Surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diharuskan untuk selalu berbuat baik dan tolong-menolong (*ta'awun*) terhadap sesama dalam hal kebajikan. Hal ini merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan di atas permukaan bumi. Prinsip tolong menolong inilah yang menjadi dasar berlakunya asuransi syariah. Pemberian sukarela (*hibah*) merupakan salah satu bentuk dari akad *tabarru'*, pemberian sukarela ini dimaksudkan untuk menolong peserta yang mengalami musibah tanpa mengharapkan imbalan kecuali dari Allah SWT. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  
 كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ، (رواه مسلم)

*Artinya:Diriwayakan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda:  
 “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang  
 mukmin, maka Allah Swt. Akan menghilangkan kesulitannya pada  
 hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang  
 maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di  
 akhirat”. (HR. Muslim)*

Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang secara tekstual menunjukkan keutamaan memenuhi kebutuhan kaum muslim dengan cara saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang. Dalam Islam berbuat baik sangat dianjurkan, apalagi berbuat baik kepada saudara sesama muslim. Dalam asuransi syariah prinsip tolong menolong tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian dana yang diniatkan oleh peserta sebagai dana hibah (*tabarru'*) yang nantinya akan diberikan kepada peserta yang mengalami musibah.

Penetapan dana *tabarru'* dalam asuransi syariah harus terhindar dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Dalam asuransi kendaraan bermotor penetapan dana *tabarru'* haruslah sesuai dengan prinsip Islam, salah satu prinsip operasional asuransi syariah adalah adanya prinsip keadilan. Keadilan berarti setiap premi yang dibebankan kepada peserta asuransi harus dalam jumlah yang sama dengan risiko-risiko yang dibawanya ke

dalam asuransi syariah. Memperoleh keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang, apalagi keadilan adalah salah satu prinsip muamalah yang dibutuhkan dalam konsep asuransi syariah. Didalam prinsip keadilan tersebut tidak boleh adanya pihak yang merasa terdzalimi atau dirugikan. Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yaitu Surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-nisa: 58)*

Dalam hal penetapan dana *tabarru'* prinsip keadilan juga harus diterapkan, dikarenakan premi merupakan unsur terpenting dalam menetapkan dana *tabarru'*, maka premi haruslah ditentukan berdasarkan porsi yang adil bagi peserta. Untuk mendapatkan tingkat keadilan yang sempurna maka perkiraan klaim harus dapat diperkirakan dengan tepat agar perusahaan terhindar dari hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat besarnya klaim dan banyaknya klaim.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan:

Dalam pembiayaan kendaraan bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan asuransi kerugian sebagai pengalihan risikonya dimana jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan *Total Loss Only* (TLO) yang menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan karena kehilangan atas pencurian.

Pada asuransi pembiayaan kendaraan bermotor ini, nasabah harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam asuransi ini, yaitu kewajiban membayar premi dan mendapatkan hak dari klaim asuransi. Premi asuransi hanya dibayar pada satu kali pembayaran yakni pada saat masa pembiayaan belum berjalan. Kemudian untuk klaim asuransi kendaraan bermotor, lembaga asuransi mengganti sisa pokok dari jumlah pembiayaannya sampai pada bulan ditutupnya, tidak termasuk keuntungan atau margin yang telah disepakati pada saat akad.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

**B. Saran:**

Pihak bank seharusnya mewajibkan setiap nasabah satu dengan yang lainnya untuk melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi hambatan-hambatan yang mengakibatkan lambatnya pelaksanaan penyelesaian klaim.

Pihak bank seharusnya bersikap transparansi ketika ada nasabah yang akan bergabung dan memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang asuransi kerugian pada saat pembiayaan belum berjalan serta menggambarkan dengan jelas akan hambatan-hambatan yang biasa terjadi ketika telah terjadi klaim.









## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

A Hastuti R. Permata dan Fitri F. Milla. *Asuransi Konvensional, Syariah & BPJS*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2016.

Al Arif M. Nur Rianto. *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Arikunto Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bima Aksara, 2006.

Hadi Sutrisno. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: ANDI, 2002.

Ismail. *Perbankan Syariah* Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Ismanto Kuart. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Lestari Nur Melinda. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Grafindo Creative Writing, 2015.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (cet. VII). Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mashuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* Bandung: Refika Adutama, 2008.

Moelong Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

----- Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Narbuko Cholid dan Ahmadi Abu. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Noor Juliyansyah. *Metode Penelitian* Jakarta: Kencana, 2011.

Prawoto Agus. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2003.

S Kaelan M. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Soemitra Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

-----. *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2014.

-----. *Memahami Penelitian Administrasi* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sujarweni V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Suryabrata Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Suryono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.

Umar Husein. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: Bima Aksara, 2009.

Zulkifli Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

### **Jurnal dan Skripsi:**

Ade Hari Siswanto, “Penyelesaian Klaim Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)”. *Lex Jurnalica*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2009.

Angger Guntur Alit. “Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPM) Berdasarkan Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 Dan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Contoh Kasus Pada PT. Bank SYR Indonesia)”. *Jurnal Ekonomi*, 2013.

Isty Prisniwi Listiowatie. *“Analisa Regulasi Tarif Referensi dalam Industri Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia”*. Jurnal Ekonomi, 2010.

Eli Sulastri. *“Pengaruh Kualitas Pelayanan Customer Service Terhadap Loyalitas Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. BPRS Miiitra Agro Usaha)”*. Skripsi Program Ekonomi UIN Raden Intan, Lampung, 2017.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011. Dea Silvia Simbolon *“Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen”*. Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

Ronny Hanitijo Sumitra. *Asuransi Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008. -----.

Tarsisi Tamudji. *Wawasan Perasuransian*. Semarang: IKIP Press, 2000. -----.

Emi Silvia. *“Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung)”*. Skripsi Program Sarjana Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Mega Listra. *“Analisis Implementasi Asuransi Dan Asuransi Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang”*. Skripsi Program Sarjana Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

“Kendaraan Bermotor”. (On-Line), tersedia di <http://id.m.wikipedia.org/wiki/> (14 Desember 2017).

“Penerapan” (On-Line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/penerapan.htm> (23 November 2017).

“Pemilikan”. (On-Line), tersedia di <http://kbbi.web.id/pemilikan.htm> (14 Desember 2017).

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Fatwa DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang ada di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

Daftar Pertanyaan Dengan Pihak Bank Financing Support:

1. Apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan pada nasabah dalam masa pembiayaan, apakah pihak bank memberikan asuransi?
2. Apa sajakah syarat-syarat pengajuan asuransi di PT. BPRS Mitra Agro Usaha?
3. Bagaimanakah cara pembayaran premi nya? Bagaimana menetapkan nilai premi yang ditanggung nasabah?
4. Sejauh ini, sudah berapakah nasabah yang mengajukan klaim kerugian?
5. Bagaimanakah prosedur PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam memberikan klaim asuransi?
6. Bagaimanakah penerapan asuransi yang diberikan PT. BPRS Mitra Agro Usaha kepada nasabah?

Narasumber

Mira Apriliani

Bandar Lampung, 12 Maret 2018  
Peneliti

Tia Destiana

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang ada di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

Daftar Pertanyaan Dengan Nasabah:

1. Apakah anda mengetahui pada produk pembiayaan kendaraan bermotor ini terdapat asuransi kerugian?
2. Adakah informasi yang diberikan dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor?
3. Bagaimanakah pelaksanaan klaim pada asuransi kendaraan bermotor?
4. Berapa lama waktu dalam pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor?
5. Seberapa puas anda dalam pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor?
6. Bagaimana peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor?
7. Bagaimana pendapat anda tentang adanya asuransi dalam pembiayaan kendaraan bermotor ini?

Narasumber

Bandar Lampung, 11 Maret 2018  
Peneliti

Tia Destiana



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang ada di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

Daftar Pertanyaan Dengan Pihak Bank Manajer Operasional:

1. Termasuk dalam jenis produk pembiayaan apakah pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Mitra Agro Usaha?
2. Apakah banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor ini?
3. Secara umum, berapakah jumlah keseluruhan nasabah di BPRS Mitra Agro Usaha?
4. Dalam setahun, berapakah jumlah nasabah yang menggunakan jenis pembiayaan kendaraan bermotor ini?
5. Apabila terjadi kecelakaan pada nasabah dan terjadi kehilangan pada barang dalam masa pembiayaan, apakah pihak bank memberikan asuransi?
6. Bagaimana langkah-langkah BPRS Mitra Agro Usaha dalam memberikan asuransi?
7. Adakah kriteria pemberian asuransi dari BPRS Mitra Agro Usaha kepada nasabah?
8. Asuransi apa sajakah yang diberikan bank kepada nasabah?
9. Bila terjadi kecelakaan pada nasabah dan kehilangan atas pencurian, bagaimanakah pihak bank menerapkan asuransinya?

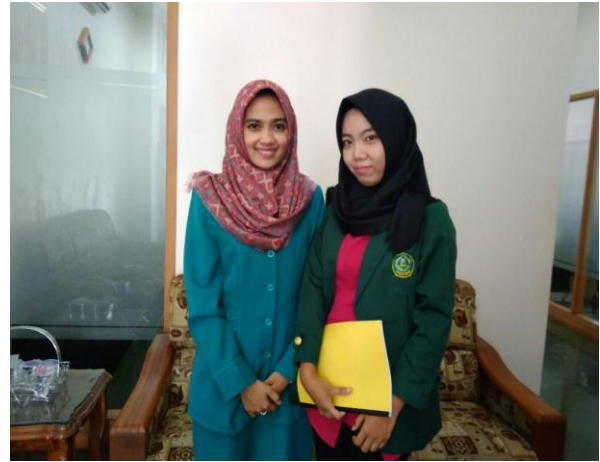
Narasumber

Agritia Gita Pratiwi

Bandar Lampung, 11 Januari 2018  
Peneliti

Tia Destiana

Wawancara Dengan Manajer Operasional  
(Agritia Gita Pratiwi)



Wawancara Dengan Financing Support  
(Mira Apriliani)



Wawancara Dengan Nasabah Pertama  
(Dyah Ayu Larasati)



Wawancara Dengan Nasabah Kedua  
(Rian Efendi )



Wawancara Dengan Nasabah Ketiga  
(Susi R)





**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama 1, Bandar Lampung 35131

**BLANKO KONSULTASI**

**Nama** : Tia Destiana  
**NPM** : 1451020130  
**Pembimbing I** : Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I  
**Pembimbing II** : Fatih Fuadi, M.S.I  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PENERAPAN ASURANSI KERUGIAN  
DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	1 Januari 2018	ACC Proposal Skripsi Oleh Pembimbing I Untuk Diseminarkan		
2	22 Januari 2018	Seminar Proposal Lanjut Revisi Proposal Oleh Pembimbing II dan I		
3	1 Februari 2018	Bimbingan Revisi Proposal Dengan Pembimbing II		
4	2 Februari 2018	ACC Revisi Proposal Oleh Pembimbing II dan I Lanjut Ke BAB I-III		
5	23 Februari 2018	Bimbingan BAB I-III Oleh Pembimbing II		
6	27 Februari 2018	ACC BAB I-III Oleh Pembimbing II Lanjut BAB IV & V		
7	13 Maret 2018	Bimbingan Daftar Pertanyaan Wawancara Oleh Pembimbing I		

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
8	28 Maret 2018	Bimbingan BAB IV & V Oleh Pembimbing II		
9	13 April 2018	ACC BAB IV & V Oleh Pembimbing II Lanjut Ke Pembimbing I		
10	16 April 2018	Bimbingan BAB I - V Oleh Pembimbing I		
11	16 April 2018	ACC Untuk Dimunaqosyahkan		

**Mengetahui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I**  
**NIP. 197707252002121001**

**Fatih Fuadi, M.S.I.**  
**NIP. 198512192015031006**

